



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. GUNA BARU TRANS RANGKANG

KANTOR BUPATI SATU ATAP KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :
- BAB.I : PENDAHULUAN
 - BAB.II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB.III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB.IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB.V : PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 45



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bengkayang, 22 September 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkayang



YUSTIANUS, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	49
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	53
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	54
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat .	56
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	57
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	57
2.2.2 Isu Strategis	69
BAB III	92
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	92
3.1. Tujuan Perangkat Daerah	92
3.2. Strategi Perangkat Daerah	136
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	141
3.4. Penyajian Lokus Renstra	143
3.5. Manajemen Risiko	145
BAB IV	147
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	147
4.1 Pendahuluan	147
4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	148
4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pendanaan	206
4.4 Program Proritas Daerah	235
4.5 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci	237
BAB V	240
PENUTUP	240



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan	22
Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana.....	24
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	32
Tabel 2.5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	42
Tabel. 2.6 Kelompok Sasaran Layanan.....	50
Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah	53
Tabel 2.8 Dukungan BUMD	55
Tabel 2.9 Kerja Sama Perangkat Daerah	56
Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	57
Tabel. 2.11 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah-2029	71
Tabel. 2.12. Tabel Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	73
Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	75
Tabel 2.13 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah Ditinjau Dari Implikasi RTRW	78
Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	85
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	95
Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	99
Tabel 3.2.1 Perumusan Strategi Sasaran 1	136
Tabel 3.2.2 Perumusan Strategi Sasaran 2	137
Tabel 3.2.3 Perumusan Strategi Sasaran 3	138
Tabel 3.2.4 Perumusan Strategi Sasaran 4	139
Tabel 3.2.5 Penentuan Strategi	140
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	141
Tabel 3.3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	143
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	153
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	207
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	234



Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	236
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	237
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	239

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	20
Gambar 3.1 Gambar Konsep Renstra.....	94
Gambar 3.2 Logical Framework Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	101
Gambar 3.3 Cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.....	105
Gambar 4.1 Gambar Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	147



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari



persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspaspial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030 disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
36. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta pedoman lampirannya;
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Porganuembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 49. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024);
 51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 8-328/2024);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
 53. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;



55. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3);
56. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 54);
57. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan;
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas;
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Sumber Daya Keuangan
- 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
- 2.7 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis
- 2.8 Rumusan Isu Strategis Daerah
- 2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah
- 3.2 Strategi Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4.2 Program Perekonomian dan Pembangunan
- 4.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah
- 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisi penegasan kembali komitmen, harapan, dan langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Renstra



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Daerah;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina hubungan kerja dengan Seluruh Perangkat Daerah dan satuan organisasi lainnya. Sekretaris Daerah juga mempunyai uraian fungsi dan sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik juga mempunyai uraian fungsi dan sebagai berikut:



- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Pemerintahan, Hukum dan HAM;
- b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang membidangi masalah Politik;
- d. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati mengenai Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan juga mempunyai uraian fungsi dan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- b. penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang



pemerintahan, hukum dan kerjasama, Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh bagian-bagian yang dibawahnya, yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum.

Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bidang Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah. Kepala Bidang Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;



- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Hukum.

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.



2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh bagian-bagian yang dibawahinya, yaitu:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian-bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2.1.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Mempunyai tugas pokok membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Mempunyai tugas pokok membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;



- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibantu oleh sub bagian-sub bagian yang dibawahinya, yaitu:

1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam inventarisasi, perencanaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengelola dan mengembangkan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan



pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. mengelola informasi kontrak;
- h. mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pembinaan pelaku pengadaan barang dan jasa, pendampingan penggunaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa dan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan personel UKPBJ;
- b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa;
- c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. mengelola personil UKPBJ;
- g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
- h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;



- j. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.13 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Administrasi Umum (Asisten III)

Asisten Administrasi Umum Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum dibantu oleh bagian-bagian yang dibawahinya, yaitu:

- 1. Bagian Umum;
- 2. Bagian Organisasi;
- 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian-bagian sebagaimana masing-masing dipimpin seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

2.1.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan



- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tata usaha umum, persuratan dan kepegawaian Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian melaksanakan fungsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.15 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



2.1.1.16 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi Sub Bagian Protokol.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

1. Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam tata protokoler, menyiapkan informasi, fasilitasi dan koordinasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.17 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam mengelola keuangan sekretariat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat daerah;
- b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat daerah;
- c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dilingkungan Sekretariat daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat daerah;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.18 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

1. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
3. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.



4. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
9. Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Jabatan Struktural:



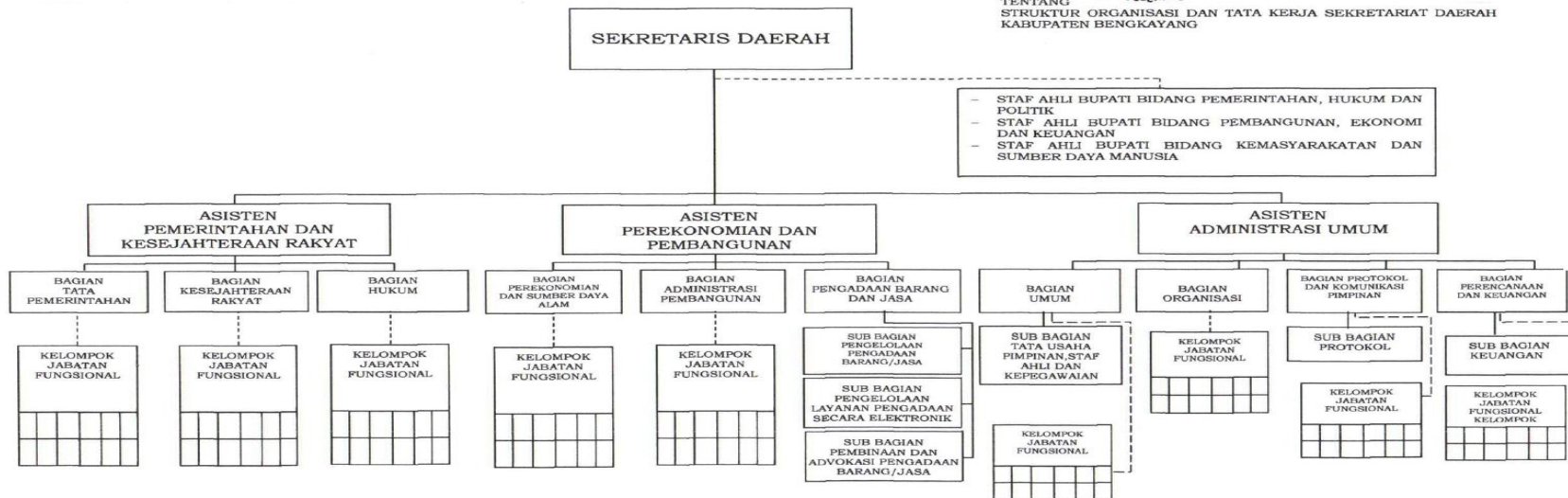
- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum
 - Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
 1. Bagian Umum terdiri atas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Bagian Keuangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 79 Tahun 2021
TANGGAL : 20 Desember 2021
TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

Gambar 2.1 Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat Daerah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 251 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	9	5	14
3	Golongan III	45	29	74
4	Golongan IV	12	3	15
5	PPPK	66	82	148
JUMLAH				251

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2025

Struktur kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 251 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Golongan I: Tidak terdapat pegawai pada golongan ini. Hal ini mencerminkan bahwa pegawai dengan jenjang pendidikan dan masa kerja rendah sangat minim, atau tidak terdapat lagi pengangkatan baru pada jenjang golongan ini, seiring dengan peningkatan standar kualifikasi pendidikan.
2. Golongan II: Terdapat sebanyak 14 orang pegawai, yang terdiri dari 9 laki-laki dan 5 perempuan. Pegawai pada golongan ini umumnya berada pada



level pelaksana dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/ sederajat). Jumlah yang relatif kecil ini mencerminkan pergeseran ke arah peningkatan kualifikasi pegawai.

3. Golongan III: Merupakan golongan dengan jumlah pegawai PNS terbanyak, yakni sebanyak 74 orang (terdiri dari 45 laki-laki dan 29 perempuan). Pegawai pada golongan ini umumnya memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan menduduki jabatan fungsional atau struktural pada jenjang pelaksana hingga administrator. Dominasi jumlah pegawai pada golongan ini menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia sebagian besar berada pada jenjang operasional teknis dan administratif.
4. Golongan IV: Terdapat sebanyak 15 orang pegawai, dengan komposisi 12 laki-laki dan 3 perempuan. Pegawai pada golongan ini umumnya menduduki jabatan struktural eselon tinggi atau fungsional madya/senior. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, keberadaan pegawai golongan IV sangat strategis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program/kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
5. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Tercatat sebanyak 148 orang pegawai PPPK, yang terdiri dari 66 laki-laki dan 82 perempuan. Komposisi ini mencerminkan peningkatan signifikan pemanfaatan skema PPPK dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam bidang teknis dan administratif. Dominasi jumlah PPPK juga mengindikasikan adanya kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pegawai melalui jalur non-PNS.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang saat ini didominasi oleh pegawai pada Golongan III dan PPPK, dengan proporsi gender yang cukup berimbang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pengembangan SDM, terutama dalam penguatan kapasitas, pengembangan karier, dan strategi pemenuhan kebutuhan ASN di masa mendatang.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah sebanyak 251 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD /Sederajat	-	-	1	1	2
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	13	5	41	25	84



4	D3	7	6	9	35	57
5	S1	32	26	15	20	93
6	S2	7	8	-	-	15
JUMLAH						251

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan data rekapitulasi tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, jumlah total pegawai mencapai 251 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Rendah (SD/Sederajat dan SMP/Sederajat):
Pegawai dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat berjumlah 2 orang, seluruhnya merupakan non-PNS. Sementara itu, tidak terdapat pegawai yang berpendidikan terakhir SMP/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat ketergantungan terhadap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dasar.
2. Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat):
Pegawai dengan pendidikan SMA/Sederajat merupakan kelompok terbanyak kedua, yakni 84 orang atau sekitar 33,5% dari total pegawai. Komposisinya terdiri dari 18 orang PNS (13 laki-laki dan 5 perempuan) serta 66 orang non-PNS (41 laki-laki dan 25 perempuan). Proporsi yang cukup besar pada kelompok ini menunjukkan masih dominannya tenaga administratif atau pelaksana dengan kualifikasi pendidikan menengah.
3. Pendidikan Diploma (D3):
Terdapat 57 orang pegawai berpendidikan Diploma III, terdiri dari 13 orang PNS dan 44 orang non-PNS. Sebagian besar pegawai D3 adalah perempuan non-PNS, yang mengindikasikan peran mereka dalam bidang-bidang teknis dan administratif tertentu.
4. Pendidikan Sarjana (S1):
Pegawai dengan pendidikan terakhir S1 merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebanyak 93 orang atau sekitar 37% dari total pegawai. Komposisi ini menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan dominasi PNS sebanyak 58 orang (32 laki-laki dan 26 perempuan), dan 35 orang non-PNS (15 laki-laki dan 20 perempuan).
5. Pendidikan Pascasarjana (S2):
Pegawai yang telah menempuh pendidikan S2 berjumlah 15 orang, seluruhnya merupakan PNS (7 laki-laki dan 8 perempuan). Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas manajerial dan kompetensi



pegawai yang diarahkan untuk menduduki jabatan strategis di lingkup Sekretariat Daerah.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan:

Secara keseluruhan, struktur tingkat pendidikan pegawai menunjukkan kecenderungan positif dengan dominasi lulusan sarjana (S1) dan diploma (D3), yang mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan pascasarjana masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal lanjutan dan pelatihan fungsional perlu terus didorong, terutama bagi PNS yang berpotensi menempati jabatan struktural maupun fungsional ahli.

Di sisi lain, proporsi non-PNS dengan pendidikan menengah (SMA) yang cukup besar juga memerlukan perhatian dalam hal peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis dan penguatan kapasitas kerja untuk mendukung pelayanan administrasi yang profesional dan efisien.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Transportable Generating Set	v		1
2	Portable Generating Set	v		1
3	Stationary Generating Set	v		2
4	Pompa Air	v		7
5	Sweeper Truck	v		1
6	Sedan	v		2
7	Jeep	v		3
8	Station Wagon	v		34
9	Station Wagon		v	5
10	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	v		1
11	Pick Up	v		2
12	Pick Up		v	3
13	Yeengler/Trailer	v		17
14	Sepeda Motor	v		19
15	Sepeda Motor		v	23
16	Mobil Tangki Air		v	1
17	Lift	v		4
18	Gerobak Dorong	v		2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
19	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	v		2
20	Motor Boat	v		1
21	Ponton	v		1
22	Mesin Kompresor	v		2
23	Mesin Jahit Terpal	v		4
24	Lain-lain	v		1
25	Elektrik Panel Cintrol	v		3
26	Global Positioning System	v		4
27	DCP (Alat Control) Sensor	v		3
28	Scanner (Universal Tester)	v		3
29	Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)	v		79
30	Bajak Kayu	v		1
31	Rak-Rak Penyimpan	v		8
32	Lemari Penyimpan	v		11
33	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	v		2
34	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	v		1
35	Mesin Ketik Listrik	v		1
36	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	v		1
37	Mesin Stensil Manual Folio	v		1
38	Mesin Stensil Manual Double Folio	v		1
39	Mesin Fotocopy Folio	v		9
40	Mesin Fotocopy Double Folio	v		1
41	Lemari Besi/Metal	v		36
42	Lemari Kayu	v		32
43	Rak Besi	v		21
44	Rak Kayu	v		10
45	Filing Cabinet Besi	v		68
46	Brandkas	v		10
47	Lemari Sorok	v		4
48	Lemari Kaca	v		9
49	Lemari Makan	v		9
50	Lain-lain	v		1
51	CCTV - Camera Control Television System	v		5
52	Peta	v		1
53	Alat Penghancur Kertas	v		13
54	Mesin Absensi	v		24
55	Alat Pemotong Kertas	v		3
56	LCD Projector/Infocus	v		4
57	Papan Gambar	v		1
58	Papan Nama Instansi	v		1
59	Papan Pengumuman	v		1
60	Teralis	v		4
61	Meja Kerja Besi/Metal	v		142



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
62	Meja Kerja Kayu	v		28
63	Kursi Besi/Metal	v		2
64	Kursi Kayu	v		17
65	Meja Rapat	v		29
66	Tempat Tidur Besi	v		88
67	Tempat Tidur Kayu	v		34
68	Meja Tambahan	v		1
69	Meja Panjang	v		37
70	Meja Bundar	v		7
71	Meja 1/2 Biro	v		118
72	Kasur/Spring Bed	v		84
73	Meja Makan Besi	v		82
74	Meja Makan Kayu	v		1
75	Kursi Rapat	v		52
76	Kursi Tamu	v		36
77	Kursi Putar	v		18
78	Kursi Biasa	v		3
79	Meja Cetakan	v		1
80	Rak Sepatu (Almunium)	v		4
81	Sofa	v		30
82	Jam Mekanis	v		4
83	Jam Elektronik	v		2
84	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	v		8
85	Mesin Pemotong Rumput	v		12
86	Mesin Cuci	v		23
87	Lemari Es	v		38
88	A.C. Sentral	v		3
89	A.C. Window	v		15
90	A.C. Split	v		100
91	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	v		3
92	Kipas Angin	v		29
93	Exhaust Fan	v		30
94	Cold Storage (Alat Pendingin)	v		4
95	Up Right Chiller/Frezzer	v		1
96	Kompor Listrik (Alat Dapur)	v		155
97	Kompor Gas (Alat Dapur)	v		18
98	Teko Listrik	v		8
99	Rice Cooker (Alat Dapur)	v		22
100	Oven Listrik	v		1
101	Tabung Gas	v		2
102	Alat Pemanggang Roti/Sate	v		2
103	Rak Piring Almunium	v		5
104	Blender	v		4
105	Oven Gas	v		2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
106	Thermos Air	v		5
107	Meja Kompor	v		2
108	Radio	v		22
109	Televisi	v		53
110	Amplifier	v		3
111	Equalizer	v		1
112	Loudspeaker	v		9
113	Sound System	v		53
114	Wireless	v		6
115	Microphone	v		16
116	Microphone Floor Stand	v		6
117	Unit Power Supply	v		1
118	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	v		77
119	Stabilisator	v		2
120	Camera Video	v		10
121	Camera film	v		11
122	Alat Hiasan	v		34
123	Gambar Presiden/Wakil Presiden	v		1
124	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	v		2
125	Seterika	v		2
126	Water Filter	v		4
127	Tangga Aluminium	v		13
128	Dispenser	v		47
129	Mimbar/Podium	v		7
130	Handy Cam	v		7
131	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	v		2
132	Karpet	v		59
133	Gordyin/Kray	v		21
134	Asbak Tinggi	v		2
135	Alat Pemanas Ruangan	v		140
136	Lemari Plastik	v		1
137	Lampu	v		3
138	Jemuran	v		7
139	Home Theater	v		1
140	Wastapel	v		1
141	Pipa Pemancar Kebakaran	v		1
142	Alat Pembantu Kebakaran	v		4
143	Lain-lain	v		1
144	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	v		1
145	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	v		2
146	Meja Kerja Pejabat Eselon II	v		2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
147	Meja Kerja Pejabat Eselon III	v		1
148	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	v		3
149	Lain-lain	v		1
150	Meja Rapat Pejabat Eselon II	v		3
151	Meja Tamu Biasa	v		11
152	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	v		1
153	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	v		3
154	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	v		4
155	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	v		6
156	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	v		17
157	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	v		1
158	Lain-lain	v		2
159	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	v		3
160	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	v		5
161	Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	v		1
162	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	v		5
163	Lemari Buku Untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	v		10
164	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	v		1
165	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	v		1
166	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	v		26
167	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		v	1
168	Buffet Kayu	v		16
169	Buffet Kaca	v		1
170	Audio Mixing Console	v		8
171	Audio Mixing Portable	v		3
172	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	v		8
173	Microphone/Wireless MIC	v		1
174	Microphone Connector Box	v		7
175	Uninterruptible Power Supply (UPS)	v		3
176	Head Compensator	v		10
177	Camera Electronic	v		4
178	Camera Wall Box	v		1
179	Rak Peralatan	v		1
180	Digital Video Effect	v		4
181	Tripod Camera	v		6
182	Lensa Kamera	v		1
183	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	v		20



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
184	Camera Digital	v		8
185	Tas Kamera	v		1
186	Telephone (PABX)	v		8
187	Handy Talky (HT)	v		45
188	Facsimile	v		10
189	Unit Tranceiver Ssb Portable	v		5
190	Mainframe (Alat Komunikasi Khusus)	v		3
191	UPS 15 KVA for HUB Station	v		8
192	Antene SHF Portable	v		11
193	Antene SHF Stationary	v		1
194	Antena All Band	v		2
195	Receiver STL/SHF	v		3
196	Peralatan Antena Penerima UHF	v		1
197	Genset	v		2
198	Charger	v		1
199	Minor Surgeri Set	v		1
200	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan)	v		2
201	Alat Pemeriksa SP Gavity Air	v		1
202	Pompa Hidrolik	v		3
203	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	v		1
204	Laminating Module With 4 Reels	v		1
205	Mesin Scanning	v		2
206	Exhaust Fan	v		1
207	Alat Press Laminasi	v		3
208	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	v		1
209	Personal Computer	v		22
210	Alat Ukur	v		1
211	Electrostatic Tester	v		1
212	Meja Kerja	v		30
213	Alat Penyaring	v		2
214	Distilling Flask	v		8
215	Kerangka Karet	v		4
216	GO Recorder	v		1
217	Kjedahl Nitrogen Digestion & Distilling Apparatus	v		9
218	Pressure Control System	v		7
219	Bateray Pack Camera	v		1
220	Mainframe (Komputer Jaringan)	v		7
221	Komputer Wedis	v		16
222	P.C Unit	v		50
223	Lap Top	v		56
224	Lap Top		v	1
225	Note Book	v		40
226	CPU (Peralatan Mainframe)	v		4



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
227	Hard Disk	v		5
228	Floppy Disk Unit (Peralatan Mini Komputer)	v		2
229	Cut Sheet Feeder	v		8
230	CPU (Peralatan Personal Komputer)	v		17
231	Monitor	v		33
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	v		93
233	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	v		2
234	External CD/ DVD Drive (ROM)	v		5
235	External/ Portable Hardisk	v		2
236	Server	v		1
237	Tenda	v		4
238	Tenda Sangga	v		3
239	Massage Chair	v		1
240	Sepeda Olah Raga	v		1

Sumber : Aplikasi SIMBADA Tahun 2025

Berdasarkan inventarisasi sarana dan prasarana, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki beragam aset penunjang operasional, mulai dari peralatan kantor, kendaraan dinas, peralatan komunikasi, hingga peralatan teknis lainnya. Dari keseluruhan aset yang tercatat, mayoritas berada dalam kondisi **baik** sehingga masih dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, terdapat sejumlah aset yang berada dalam kondisi **rusak**, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pemeliharaan maupun pengadaan kembali.

Kategori aset terbesar meliputi:

1. Peralatan Kantor dan Furnitur

Jumlahnya sangat dominan, seperti meja kerja (142 unit besi/metal dan 28 unit kayu), kursi rapat/tamu/kerja berbagai tipe, lemari arsip (68 filing cabinet besi, 36 lemari besi/metal, dan 32 lemari kayu), serta perlengkapan rapat seperti meja rapat (29 unit) dan podium. Ketersediaan ini menunjukkan dukungan memadai terhadap kebutuhan administrasi dan pelayanan, meskipun beberapa peralatan mulai memerlukan peremajaan.

2. Peralatan Elektronik dan Teknologi Informasi

Aset meliputi komputer (50 unit PC, 56 laptop, 40 notebook), printer (93 unit), proyektor (4 unit), server, perangkat jaringan, serta perangkat audio-visual (sound system, televisi, CCTV). Kondisi sebagian besar baik, namun mengingat perkembangan teknologi, diperlukan pembaruan berkala untuk menjaga kompatibilitas dan kinerja.



3. **Kendaraan Dinas dan Transportasi**

Terdiri dari mobil dinas berbagai tipe (sedan, jeep, station wagon, bus, pick up), sepeda motor, kendaraan khusus (sweeper truck, mobil tangki air, trailer), serta perahu motor dan ponton. Secara umum kendaraan masih layak pakai, namun kendaraan yang sudah berusia lama memerlukan peningkatan pemeliharaan untuk menjaga keandalan.

4. **Peralatan Peunjang Operasional dan Teknis**

Termasuk genset, pompa air, peralatan laboratorium, peralatan komunikasi (HT, facsimile, antena), serta peralatan dapur dan pemeliharaan gedung. Ketersediaan peralatan ini menjadi faktor pendukung kelancaran pelayanan dan kegiatan kedinasan, terutama dalam situasi darurat.

5. **Peralatan Khusus dan Inventaris Lainnya**

Meliputi tenda, peralatan kebersihan, pendingin ruangan (AC), karpet, gordyn, dan peralatan dekorasi. Meskipun bukan aset utama, keberadaannya memberikan kenyamanan kerja dan mendukung kelancaran kegiatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi aset secara umum baik dan mampu menunjang operasional Sekretariat Daerah. Namun, terdapat kebutuhan strategis yang perlu dimasukkan dalam dokumen Renstra, antara lain:

- Program pemeliharaan rutin untuk mencegah penurunan kualitas aset;
- Penggantian atau penghapusan aset rusak untuk efisiensi biaya dan efektivitas penggunaan ruang;
- Pengadaan peralatan berbasis teknologi terkini untuk mendukung transformasi digital;
- Optimalisasi penggunaan aset melalui sistem manajemen inventaris yang terintegrasi.

Upaya ini akan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki tetap relevan, berfungsi optimal, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik serta arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, maka kinerja Sekretariat Daerah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi IKU. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70	Indeks Reformasi Birokrasi	-	70	B	B (60)	CC	50,29	CC	B (55,59)	B (69,70)	B (60)	CC 50,29	B (55,59)	B (69,70)
2	Predikat/Indeks SPBE	50	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	50	C	C (2,40)	-	1,76	C	C (2,46)	-	C (2,40)	1,76	C (2,46)	-
3	Nilai Pelayanan Publik	50	Nilai Pelayanan Publik	-	50	0	C (70)	B	80,55	0	C (70,49)	B	C (70)	80,55	C (70,49)	B
4	Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	50	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	-	50	B	B (60)	B	58,89	B	B (60,90)	B	B (60)	58,89	B (60,90)	B
5	Nilai Tingkat Disiplin ASN	60	Nilai Tingkat Disiplin ASN	-	60	Sedang	Sedang (80,50%)	Sedang	93,67	Sedang	Tinggi (91,31%)	Sedang	Sedang (80,50%)	93,67	Sedang (91,31%)	Sedang
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60	Tingkat Kepuasan Masyarakat	-	60	B	B (80)	B	83,38	B	B (81,80)	B	B (80)	83,38	B (81,80)	B
7	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	0		-	0	0	1	100%	0	0	1,0163	100%	0	100%	0	100%
8	Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	60		-	60	0	0	100,00%	70,23	0	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%
9	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,003	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	3,003	Tinggi	Sedang (2)	Sedang	n/a	Tinggi	Sedang (2,6460)	Nilai belum keluar	Tinggi	Sedang (2,6460)	Nilai belum keluar	
10	Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	0	Persentase regulasi yang ditetapkan sesuai amanat UU	-	0	100%	1	100%	0	100%	1,0774	111%	100%	1,0774 (111%)		
11	Persentase Produk Hukum (Perbup)	0,72		-	72%	0%	0%	0,00%	111%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%
12	Persentase Produk Hukum (Perda)	0,11		-	11%	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20
13	Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	0		-	0	0	1	0%	0	0	1	0%	0	0%	0	0%
14	Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	0		-	0	Sedang	Tinggi (100%)	100%	0	Sedang	Tinggi (100%)	100%	Tinggi (100%)	100%	Tinggi (100%)	100%
15	Persentase Pemberian Bantuan Ibadah	100%		-	100%	0%	0%	0,00%	138%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%
16	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	3,003	Tingkat kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	-	3,003	100%	Tinggi (100%)	100,00%	94,77	100%	Tinggi (141,38%)	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%
17	Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	0,05	Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR	-	5%	4%	4%	0,00%	4%	n/a	20%	0,00%	4%	0,00%	n/a	0,00%
18	Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	0		-	0	0	0	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	100%
19	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	50	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	-	50	100%	1	0,00%	60,12	100%	1,099	0,00%	100%	0,00%	100%	0,00%
20	Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	4044	Persentase paket pengadaan yang terlaksana	-	4044	100%	1	100,00%	75,83	96,48%	1,29	97,00%	100%	100,00%	96,48%	97,00%
21	Persentase Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian	95,98		-	95,98%	0,00%	0	0%	98,53%	0,00%	0	0%	0,00%	0%	0,00%	0%
22	Persentase Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan	100		-	100	0	0	0,00%	89,51	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
23	Persentase OPD yang melaporkan progres fisik tepat waktu	95,98		-	95,98%	0,00%	0	0,00%	8384,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



Dianalisis dengan analisis diagnostik (analisis sebab dan akibat) dan deskriptif terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menunjukkan perkembangan yang beragam. Secara umum, terdapat beberapa indikator yang telah menunjukkan kinerja positif dan melampaui target, namun masih ada pula indikator yang kinerjanya belum optimal dan memerlukan perhatian lebih serius pada periode Renstra 2025–2029.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan tren peningkatan dari predikat “CC” menuju “B”. Pada tahun 2021 nilai masih rendah di kisaran 50,29 (CC), namun meningkat menjadi 55,59 (B) pada 2022, hingga 69,70 (B) pada 2023.

- **Sebab:** Keterbatasan inovasi pelayanan, lemahnya konsistensi budaya kinerja ASN, serta minimnya evaluasi tindak lanjut rekomendasi RB.
- **Akibat:** Peningkatan kualitas tata kelola belum signifikan, efektivitas birokrasi belum sepenuhnya efisien.

Permasalahan: Reformasi birokrasi belum menyentuh perbaikan manajemen kinerja secara menyeluruh

Arah Strategis: Penguatan manajemen kinerja ASN, peningkatan budaya kerja berorientasi hasil, serta penerapan inovasi pelayanan publik berbasis digital.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai SPBE masih stagnan di level “C” dengan skor sekitar 2,40–2,46. Belum ada peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

- **Sebab:** Integrasi aplikasi antar-OPD masih rendah, keterbatasan SDM digital, serta infrastruktur TIK yang belum merata.
- **Akibat:** Efektivitas layanan berbasis elektronik rendah, belum mendukung transformasi digital pemerintahan.

Permasalahan: Rendahnya kualitas tata kelola SPBE menghambat percepatan pelayanan digital.

Arah Strategis: Penguatan integrasi sistem antar-OPD, peningkatan kompetensi ASN digital, dan percepatan penyediaan infrastruktur TIK.

3. Nilai Pelayanan Publik

Nilai pelayanan publik meningkat signifikan, dari kategori “C” dengan skor 70,49 pada 2021 menjadi “B” dengan skor 80,55 pada 2023.

- **Sebab:** Implementasi standar pelayanan mulai diterapkan, adanya perbaikan sarana prasarana pelayanan.
- **Akibat:** Kepuasan masyarakat meningkat, namun masih ada variasi kualitas antar-unit layanan.

Permasalahan: Standar pelayanan belum seragam dan belum seluruhnya berbasis digital.



Arah Strategis: Standarisasi pelayanan publik, digitalisasi pelayanan, serta penerapan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

4. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Nilai SAKIP berada di kategori “B”, dengan skor stabil sekitar 58,89–60,90. Tidak ada peningkatan drastis selama 2021–2023.

- **Sebab:** Penyusunan perencanaan kinerja masih normatif, belum sepenuhnya berbasis hasil, serta lemahnya monitoring.
- **Akibat:** Efisiensi anggaran belum optimal, penyesuaian perencanaan–penganggaran masih lemah.

Permasalahan: Kualitas implementasi SAKIP stagnan, belum mampu mendorong efektivitas pembangunan.

Arah Strategis: Penguatan penyusunan perencanaan berbasis hasil, monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih ketat, serta capacity building perencana.

5. Nilai Tingkat Disiplin ASN

Tingkat disiplin ASN meningkat dari kategori sedang (80,50%) ke kategori tinggi (93,67% pada 2022 dan 91,31% pada 2023).

- **Sebab:** Penerapan e-presensi lebih konsisten, adanya pengawasan kedisiplinan yang diperkuat.
- **Akibat:** Produktivitas meningkat, namun kualitas output ASN tidak selalu berbanding lurus dengan kehadiran.

Permasalahan: Disiplin administratif tercapai, tetapi kinerja berbasis hasil belum maksimal.

Arah Strategis: Penguatan disiplin kinerja berbasis hasil (performance based), reward and punishment lebih terukur.

6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat stabil tinggi, di kisaran 81,80–83,38 (kategori B).

- **Sebab:** Perbaikan sarana prasarana layanan dan penyederhanaan prosedur.
- **Akibat:** Kepercayaan masyarakat mulai meningkat, meskipun masih ada keluhan di layanan tertentu.

Permasalahan: Variasi kualitas pelayanan antar-OPD masih lebar.

Arah Strategis: Konsistensi peningkatan kualitas layanan, standarisasi mekanisme keluhan, dan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

7. Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran menunjukkan capaian penuh (100%) secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh proses administrasi dasar berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

- **Sebab:** Ketersediaan perangkat administrasi standar, pengawasan internal berjalan baik, serta prosedur administrasi relatif sederhana.



- **Akibat:** Administrasi perkantoran mendukung kelancaran kerja organisasi, meskipun belum sepenuhnya terdigitalisasi.
Permasalahan: Proses administrasi masih bersifat manual di beberapa unit kerja, mengakibatkan inefisiensi waktu.
Arah Strategis: Penguatan digitalisasi administrasi perkantoran, penerapan e-office secara penuh, serta integrasi layanan administrasi antar-bagian.
- 8. Persentase Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**
Capaian indikator ini relatif tinggi, mendekati 100% pada tahun 2022–2023. Hal ini menunjukkan dukungan administrasi keprotokolan berjalan baik, walaupun capaian awalnya rendah.
- **Sebab:** Adanya SOP keprotokolan yang mulai dipatuhi, ketersediaan SDM pendukung, serta koordinasi yang lebih baik antar-subbagian.
 - **Akibat:** Kegiatan pimpinan dapat terlaksana dengan lancar, meskipun kualitas komunikasi publik belum sepenuhnya maksimal.
Permasalahan: Masih ada keterbatasan dalam pemanfaatan media komunikasi modern (digital branding pemerintah).
Arah Strategis: Penguatan komunikasi publik berbasis digital, peningkatan kompetensi keprotokolan ASN, serta optimalisasi media resmi pemerintah daerah.
- 9. Nilai LPPD Pemerintah Daerah**
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berada di kategori “Sedang–Tinggi” dengan skor 2,646 pada 2022, namun data capaian 2023 belum tersedia.
- **Sebab:** Penyusunan laporan sudah sesuai pedoman, namun masih terdapat kelemahan dalam akurasi data dan konsistensi pelaporan.
 - **Akibat:** Nilai LPPD belum optimal, sehingga mempengaruhi persepsi kinerja pemerintah daerah di tingkat nasional.
Permasalahan: Data kinerja sektoral dari OPD belum sepenuhnya terintegrasi dalam laporan.
Arah Strategis: Penguatan sistem pelaporan berbasis kinerja, integrasi data lintas-OPD, dan peningkatan akurasi serta validitas data LPPD.
- 10. Persentase Regulasi yang Telah Ditetapkan Sesuai Amanat Undang-Undang**
Indikator ini menunjukkan capaian konsisten 100% bahkan melampaui target pada 2023 (111%). Artinya, produk regulasi yang diwajibkan UU sudah ditetapkan dengan baik.
- **Sebab:** Komitmen eksekutif dalam menyusun regulasi sesuai amanat hukum, serta koordinasi legislatif yang relatif lancar.
 - **Akibat:** Kebutuhan regulasi dasar terpenuhi, meskipun kualitas regulasi masih beragam.
Permasalahan: Produk regulasi cenderung reaktif terhadap mandat UU, belum sepenuhnya berbasis kebutuhan daerah.



Arah Strategis: Meningkatkan kualitas substansi regulasi, memperkuat kajian hukum sebelum penetapan, dan memperluas partisipasi publik dalam proses legislasi daerah.

11. Persentase Produk Hukum (Peraturan Bupati/Perbup)

Capaian penyusunan Perbup masih sangat rendah, bahkan 0% pada periode 2021–2023, padahal target 72% sudah ditetapkan.

- **Sebab:** Lemahnya perencanaan legislasi tahunan, keterbatasan tenaga perancang hukum, serta koordinasi OPD dalam mengusulkan regulasi rendah.
- **Akibat:** Banyak kebijakan teknis belum memiliki payung hukum operasional, menghambat implementasi program daerah.
Permasalahan: Keterlambatan dan rendahnya produksi Perbup yang seharusnya menjadi instrumen teknis pelaksanaan Perda.
Arah Strategis: Penguatan perencanaan program legislasi daerah (Prolegda), peningkatan kapasitas perancang peraturan, dan percepatan proses harmonisasi regulasi.

12. Persentase Produk Hukum (Peraturan Daerah/Perda)

Penyusunan Perda juga masih sangat rendah, dengan capaian 0% sepanjang 2021–2023 dibanding target 11%.

- **Sebab:** Rendahnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, keterbatasan kajian akademik, serta rendahnya dorongan politik untuk mempercepat pembahasan Perda.
- **Akibat:** Banyak kebijakan daerah tidak memiliki legitimasi hukum formal, menimbulkan risiko hukum dalam implementasi.
Permasalahan: Rendahnya kinerja legislasi daerah dalam menghasilkan Perda yang relevan dan berkualitas.
- **Arah Strategis:** Penyusunan prolegda yang realistis, penguatan riset akademik untuk naskah Perda, dan penguatan hubungan kelembagaan eksekutif–legislatif.

13. Tingkat Kerukunan dan Kehidupan Beragama Kemasyarakatan

Indikator ini menunjukkan capaian sangat rendah, yaitu 0% sepanjang periode 2021–2023, meskipun target telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan belum adanya mekanisme ukur yang efektif untuk menilai kerukunan umat beragama.

- **Sebab:** Belum tersedia instrumen survei yang jelas, kegiatan penguatan kerukunan masih bersifat seremonial, serta keterbatasan koordinasi dengan FKUB.
- **Akibat:** Kinerja terlihat nol, meskipun secara faktual kehidupan beragama relatif harmonis.
Permasalahan: Belum adanya indikator terukur yang bisa menggambarkan kondisi kerukunan secara obyektif.



Arah Strategis: Penyusunan instrumen survei kerukunan, penguatan program lintas agama, dan fasilitasi dialog antarumat beragama secara rutin.

14. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Bidang Keagamaan

Capaian indikator ini konsisten 100% dengan kategori sedang-tinggi. Hal ini menunjukkan pembinaan dan pelayanan keagamaan sudah berjalan baik.

- **Sebab:** Dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pembinaan keagamaan relatif konsisten, serta adanya kemitraan dengan tokoh agama.
- **Akibat:** Kualitas pelayanan keagamaan terjaga, meski belum sepenuhnya merata di daerah terpencil.

Permasalahan: Akses dan pemerataan pelayanan keagamaan masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman.

Arah Strategis: Pemerataan pelayanan keagamaan, peningkatan fasilitas ibadah, serta pemberdayaan tokoh agama lokal.

15. Persentase Pemberian Bantuan Ibadah

Realisasi indikator ini sangat rendah (0%) dibanding target 100% pada 2021–2023, meskipun pada satu titik sempat tercatat 138%.

- **Sebab:** Keterbatasan anggaran hibah keagamaan, kurangnya mekanisme distribusi bantuan, serta prioritas APBD yang bergeser.
- **Akibat:** Banyak rumah ibadah dan kegiatan keagamaan tidak mendapat dukungan memadai.

Permasalahan: Pemberian bantuan ibadah tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat.

Arah Strategis: Penyusunan mekanisme transparan pemberian bantuan, perencanaan hibah keagamaan berbasis kebutuhan, dan penguatan akuntabilitas bantuan sosial keagamaan.

16. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha

Indikator ini menunjukkan capaian tinggi, yakni 100% dengan skor mencapai 141,38% pada tahun 2022. Artinya, kerjasama dengan dunia usaha berjalan dengan baik.

- **Sebab:** Adanya dukungan program CSR, keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah, dan komitmen kemitraan yang kuat.
- **Akibat:** Tumbuhnya kolaborasi pembangunan, terutama dalam bidang sosial dan infrastruktur.

Permasalahan: Belum ada payung hukum daerah yang kuat untuk menjamin kesinambungan kerjasama.

Arah Strategis: Penyusunan regulasi tentang kemitraan pemerintah–dunia usaha, penguatan forum CSR daerah, dan monitoring hasil kerjasama.



17. Persentase Perusahaan yang Melaksanakan CSR

Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR masih rendah, hanya 4% dari target 5% pada 2021–2023, bahkan beberapa tahun menunjukkan 0%.

- **Sebab:** Belum adanya kewajiban atau insentif jelas untuk CSR, kurangnya pengawasan, serta lemahnya komitmen sebagian perusahaan.
- **Akibat:** Potensi dukungan dunia usaha terhadap pembangunan daerah tidak optimal.

Permasalahan: Rendahnya kontribusi perusahaan melalui program CSR.

Arah Strategis: Penguatan regulasi CSR, pemberian insentif atau penghargaan bagi perusahaan aktif CSR, serta pengawasan yang lebih ketat.

18. Persentase OPD yang Realisasi Fisik dan Penyerapan Anggaran Sesuai Target Triwulan

Indikator ini menunjukkan capaian penuh (100%) secara konsisten setiap tahun.

- **Sebab:** Peningkatan disiplin perencanaan anggaran, pengendalian realisasi triwulan yang ketat, dan monitoring rutin dari TAPD.
- **Akibat:** Penyerapan anggaran lebih terkendali, namun kualitas belanja masih perlu evaluasi.

Permasalahan: Penyerapan tinggi belum selalu diikuti dengan peningkatan kualitas output pembangunan.

Arah Strategis: Menghubungkan pengendalian penyerapan anggaran dengan kualitas hasil pembangunan, serta memperkuat sistem monitoring berbasis outcome.

19. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator ini menunjukkan fluktuasi. Pada beberapa tahun capaian mendekati 100%, tetapi ada juga penurunan ke sekitar 60,12%. Artinya, belum semua OPD mencapai target kinerjanya secara konsisten.

- **Sebab:** Kualitas perencanaan kinerja antar-OPD belum merata, sebagian target terlalu ambisius, serta lemahnya monitoring lintas-perangkat daerah.
- **Akibat:** Akumulasi kinerja daerah tidak stabil, berdampak pada rendahnya konsistensi hasil pembangunan.

Permasalahan: Ketidakseimbangan kinerja antar-OPD menyebabkan agregasi capaian daerah kurang optimal.

Arah Strategis: Penguatan koordinasi monitoring kinerja lintas-OPD, penyesuaian target agar realistis, dan peningkatan akuntabilitas capaian per perangkat daerah.



20. Persentase Jumlah Paket Pengadaan yang Terlaksana

Indikator ini menunjukkan capaian tinggi, rata-rata 96–97% dengan tren stabil, mendekati target penuh (100%).

- **Sebab:** Proses lelang dan penunjukan penyedia relatif lancar, adanya sistem pengadaan elektronik (LPSE) yang efektif.
- **Akibat:** Pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai rencana, meski kualitas pengawasan output pengadaan masih bervariasi.
Permasalahan: Fokus masih pada kuantitas paket yang selesai, belum pada kualitas hasil barang/jasa yang diperoleh.
Arah Strategis: Penguatan aspek value for money dalam pengadaan, peningkatan kualitas pengawasan, serta mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam proses pengadaan.

21. Persentase Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perekonomian

Capaian indikator ini rendah, bahkan mendekati 0% pada hampir seluruh periode, meskipun sempat mencatat angka 98,53% pada satu tahun tertentu.

- **Sebab:** Keterbatasan sistem monitoring ekonomi daerah, lemahnya koordinasi dengan OPD sektor ekonomi, serta kurangnya SDM analis ekonomi.
- **Akibat:** Pemerintah daerah tidak memiliki basis data ekonomi yang kuat untuk pengambilan keputusan.
Permasalahan: Rendahnya konsistensi pemantauan dan pelaporan bidang ekonomi.
Arah Strategis: Pembangunan dashboard ekonomi daerah, penguatan koordinasi lintas-OPD sektor ekonomi, dan peningkatan kapasitas analis ekonomi di Setda.

22. Persentase Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pembangunan

Sama dengan indikator 21, capaian indikator ini rendah, dengan tren 0% pada hampir seluruh periode meskipun target ditetapkan 100%.

- **Sebab:** Tidak adanya mekanisme rutin evaluasi pembangunan lintas sektor, lemahnya integrasi dengan Bappeda, serta keterbatasan instrumen pelaporan.
- **Akibat:** Evaluasi pembangunan tidak terdokumentasi baik, sehingga sulit menilai efektivitas pembangunan jangka menengah.
Permasalahan: Monitoring dan evaluasi pembangunan tidak sistematis dan tidak terintegrasi.
Arah Strategis: Integrasi fungsi pemantauan pembangunan antara Setda dan Bappeda, penguatan instrumen evaluasi, serta pelatihan teknis bagi staf pemantau pembangunan.



23. Persentase OPD yang Melaporkan Progres Fisik Tepat Waktu

Indikator ini mencatat capaian sangat tidak wajar, dengan data ekstrim (8384%) pada satu tahun dan 0% pada tahun lainnya. Hal ini menunjukkan ketidakakuratan data atau kelemahan sistem pelaporan.

- **Sebab:** Tidak ada sistem pelaporan standar antar-OPD, lemahnya disiplin pelaporan, serta kemungkinan kesalahan input data.
- **Akibat:** Informasi progres pembangunan tidak dapat digunakan secara andal untuk pengambilan keputusan.

Permasalahan: Lemahnya sistem pelaporan progres pembangunan OPD.

Arah Strategis: Penerapan aplikasi e-monitoring terintegrasi, penegakan disiplin pelaporan, dan verifikasi data pelaporan sebelum dipublikasikan.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.523.400	7.500.000	39.995.000	42.902.500	33.094.975	7.393.000	39.180.250	39.521.800	90,61%	98,57%	97,96%	92,12%	120,36	117,72
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.225.800	7.500.000	15.000.000	2.480.000	7.909.600	7.291.000	9.333.600	1.658.000	96,16%	97,21%	62,22%	66,85%	2,57	-20,68
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.789.950	7.500.000	15.000.000	5.145.000	24.335.200	7.084.300	14.805.600	2.554.500	94,36%	94,46%	98,70%	49,65%	-12,21	-14,88
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.451.600	5.932.000	5.005.000	12.326.000	7.963.000	5.932.000	4.813.320	11.556.200	76,19%	100,00%	96,17%	93,75%	29,13	31,91
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	6.962.000	15.000.000	6.541.160	14.060.200	6.962.000	14.700.425	5.929.050	93,73%	100,00%	98,00%	90,64%	1,83	0,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.931.000	7.500.000	15.000.000	8.671.000	50.686.600	7.273.000	14.495.900	7.833.200	97,60%	96,97%	96,64%	90,34%	-9,25	-10,77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.991.800	7.500.000	20.000.000	14.340.000	24.375.300	7.046.000	18.988.100	13.439.300	97,53%	93,95%	94,94%	93,72%	22,79	23,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.946.635.520	10.453.050.787	11.395.900.901	11.122.206.041	-	9.896.473.008	11.118.421.919	10.715.666.691	0,00%	94,68%	97,57%	96,34%	-1,96	4,36
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	7.500.000	15.000.000	11.838.000	-	7.363.000	14.598.450	10.524.800	0%	98,17%	97,32%	88,91%	39,46	35,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.336.750	7.500.000	15.000.000	10.303.000	16.376.750	7.489.000	13.689.950	8.217.050	94,46%	99,85%	91,27%	79,75%	3,98	-3,82
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	6.582.000	15.000.000	9.242.000	-	5.700.200	8.346.500	7.923.000	0,00%	86,60%	55,64%	85,73%	44,75	20,68
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.650.900	7.500.000	15.000.000	4.295.000	16.440.900	7.477.000	13.126.800	3.305.500	98,74%	99,69%	87,51%	76,96%	-8,77	-17,93



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	6.470.000	15.000.000	11.021.500	-	6.465.200	8.358.500	9.715.100	0,00%	99,93%	55,72%	88,15%	52,66	22,76
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	28.907.800	7.500.000	15.000.000	14.621.000	27.864.200	7.500.000	11.130.150	13.894.500	96,39%	100,00%	74,20%	95,03%	7,81	0,05
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	159.494.953	191.972.700	178.307.150	-	159.383.200	159.836.750	178.105.600	-	99,93%	83,26%	99,89%	0,00%	-28,92	-29,43
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	65.945.000	15.000.000	1.649.000	-	-	3.132.500	1.248.000	0,00%	0,00%	20,88%	75,68%	-83,13	-30,08
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	7.500.000	15.000.000	5.590.500	-	7.500.000	8.523.250	5.319.400	0,00%	100,00%	56,82%	95,15%	18,64	-11,97
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	235.283.200	244.613.900	314.000.000	122.491.000	199.388.519	188.302.450	273.453.451	116.554.670	84,74%	76,98%	87,09%	95,15%	-9,55	-5,91
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.513.800	7.500.000	37.310.000	-	12.897.600	6.986.000	9.232.000	-	95,44%	93,15%	24,74%	0,00%	84,32	-37,89
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	7.500.000	20.520.000	2.560.000	-	7.140.000	19.395.653	-	0,00%	95,20%	94,52%	0,00%	43,04	35,82
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.314.000	163.661.000	77.950.000	20.988.000	38.522.800	95.894.393	77.113.270	19.750.011	81,42%	58,59%	98,93%	94,10%	40,15	18,32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.132.800	405.449.000	247.606.566	142.928.000	104.168.000	144.509.000	151.546.651	135.265.000	96,33%	35,64%	61,20%	94,64%	64,58	10,95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	556.285.428	376.670.000	503.080.000	183.341.050	486.949.900	376.590.400	459.522.300	169.335.000	87,54%	99,98%	91,34%	92,36%	-20,76	-21,26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	388.425.100	904.484.800	726.628.000	84.489.200	223.048.000	888.310.000	679.455.000	80.049.000	57,42%	98,21%	93,51%	94,74%	8,27	62,18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	733.760.000	1.019.829.000	806.335.000	324.372.500	654.776.300	580.441.500	642.866.000	315.895.400	89,24%	56,92%	79,73%	97,39%	-13,91	-17,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186.068.800	64.625.000	59.501.000	72.116.000	186.066.500	64.561.500	59.432.500	72.109.000	100,00%	99,90%	99,88%	99,99%	-17,33	-17,31
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.000.000	27.999.000	28.560.100	9.780.000	30.315.000	27.360.000	23.360.000	7.506.000	77,73%	97,72%	81,79%	76,75%	-30,65	-30,75



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Penyediaan Bahan/Material	-	30.000.000	25.400.000	39.852.600	-	29.001.000	25.280.000	-	0,00%	96,67%	99,53%	0,00%	20,78	-56,42
Fasilitasi Kunjungan Tamu	136.910.000	1.050.000.000	550.972.500	512.310.000	85.837.080	477.035.500	439.716.000	502.696.900	62,70%	45,43%	79,81%	98,12%	204,13	154,08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.234.154.000	1.562.385.000	1.985.278.000	2.031.459.000	1.149.020.775	1.519.626.833	1.889.432.423	2.031.456.679	93,10%	97,26%	95,17%	100,00%	18,66	21,37
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	7.375.000	11.420.000	-	-	7.140.000	11.213.250	-	0,00%	96,81%	98,19%	0,00%	-22,58	-21,48
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	55.000.000	65.900.000	55.000.000	-	30.513.000	64.297.700	44.800.000	0,00%	55,48%	97,57%	81,45%	1,64	40,20
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.473.900.000	1.470.000.000	-	600.375.000	-	1.408.000.000	-	600.300.000	0,00%	95,78%	0,00%	99,99%	-50,13	-100,00
Pengadaan Mebel	99.358.000	24.877.400	166.300.000	13.000.000	95.220.000	24.787.500	134.100.000	12.750.000	95,84%	99,64%	80,64%	98,08%	133,78	92,18
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	148.182.950	449.183.500	358.021.200	-	143.315.000	290.950.000	358.000.000	0,00%	96,71%	64,77%	99,99%	91,42	63,03
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	702.047.230	407.411.100	1.830.062.000	78.351.301	526.563.000	391.965.000	1.806.904.000	76.700.000	75,00%	96,21%	98,73%	97,89%	70,50	79,89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.912.000	7.500.000	7.650.000	-	-	7.500.000	7.600.000	-	0,00%	100,00%	99,35%	0,00%	-45,01	-49,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.396.319.100	1.226.432.478	1.433.455.200	1.163.938.314	1.206.457.527	1.138.907.357	1.317.970.697	1.060.524.257	86,40%	92,86%	91,94%	91,12%	-4,70	-3,14
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.891.500	474.150.800	804.138.325	650.468.792	80.775.800	291.059.510	774.187.500	640.285.500	66,82%	61,39%	96,28%	98,43%	114,23	136,34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.967.974.411	4.683.234.514	4.708.836.340	4.750.836.432	4.069.463.895	4.521.380.040	4.582.790.118	4.628.246.232	81,91%	96,54%	97,32%	97,42%	-1,43	4,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	848.770.000	712.860.000	962.961.800	620.428.300	684.542.574	712.455.616	962.852.250	562.803.000	80,65%	99,94%	99,99%	90,71%	-5,50	-0,78



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	47.000.000	55.000.000	67.000.000	38.228.700	44.539.000	43.190.100	63.445.900	63,71%	94,76%	78,53%	94,70%	5,72	20,13
Pemeliharaan Mebel	-	21.000.000	3.040.000	-	-	20.850.000	-	-	0,00%	99,29%	0,00%	0,00%	-92,76	-100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.760.000	325.705.150	504.362.625	210.108.000	216.904.000	325.648.461	496.237.000	169.900.000	81,31%	99,98%	98,39%	80,86%	6,20	12,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	860.000.000	2.984.800.000	149.568.970	-	-	2.146.811.689	149.003.970	-	0,00%	71,92%	99,62%	0,00%	17,36	-96,53
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	189.837.600	189.837.600	191.976.000	174.021.625	-	177.631.366	179.651.957	152.408.690	0,00%	93,57%	93,58%	87,58%	-2,74	-7,01
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	91.970.000	179.800.000	85.200.000	85.200.000	91.970.000	179.800.000	46.000.000	78.900.000	100,00%	100,00%	53,99%	92,61%	14,29	30,87
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	31.000.000	62.000.000	-	-	-	5.296.726	-	0,00%	0%	8,54%	0,00%	0,00	-100,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	396.000.000	396.000.000	366.000.000	0,00%	99,00%	99,00%	91,50%	0,00	-3,79
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	750.808.000	790.800.000	561.600.000	561.600.000	750.600.000	790.780.000	559.912.000	554.953.500	99,97%	100,00%	99,70%	98,82%	-7,89	-8,24
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	439.761.000	441.600.000	441.600.000	381.600.000	367.896.500	440.977.000	439.912.000	356.693.000	83,66%	99,86%	99,62%	93,47%	-4,39	0,24
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	94.360.000	85.666.000	45.900.000	227.296.000	72.789.645	82.915.025	41.688.000	218.267.000	77,14%	96,79%	90,82%	96,03%	113,19	129,25
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	354.952.200	228.045.250	265.500.000	131.771.000	316.334.899	227.068.974	262.245.550	127.204.558	89,12%	99,57%	98,77%	96,53%	-23,23	-21,41
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	163.588.050	157.204.000	194.500.000	68.784.000	161.082.313	156.640.459	193.790.075	67.790.600	98,47%	99,64%	99,64%	98,56%	-14,94	-14,69



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	209.926.900	221.798.700	250.000.000	89.034.000	199.920.835	221.563.340	228.695.550	85.635.979	95,23%	99,89%	91,48%	96,18%	-15,34	-16,17
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	38.387.000	-	-	-	37.700.200	0,00%	0,00%	0,00%	98,21%	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	60.830.000	-	-	-	54.154.600	0,00%	0,00%	0,00%	89,03%	0,00	0,00
Fasilitasi Keprotokolan	124.898.000	169.269.200	252.000.000	104.166.000	122.776.800	168.251.600	242.277.433	103.993.738	98,30%	99,40%	96,14%	99,83%	8,58	7,99
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	112.560.200	150.885.000	312.000.000	100.396.000	103.417.000	144.183.600	282.158.528	100.354.915	91,88%	95,56%	90,44%	99,96%	24,34	23,56
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	418.969.100	396.396.000	526.562.400	355.501.000	417.795.645	395.833.368	515.101.124	355.438.259	99,72%	99,86%	97,82%	99,98%	-1,68	-2,04
Penataan Administrasi Pemerintahan	908.520.200	620.695.400	618.000.000	693.818.100	602.597.200	616.801.554	614.704.175	689.112.545	66,33%	99,37%	99,47%	99,32%	-6,62	4,71
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	585.831.000	133.054.200	204.000.000	37.108.960	320.428.673	130.995.594	197.523.222	35.459.100	54,70%	98,45%	96,83%	95,55%	-35,26	-30,13
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	472.264.300	325.933.000	255.000.000	250.872.840	463.710.800	325.391.410	232.053.084	234.615.025	98,19%	99,83%	91,00%	93,52%	-18,12	-19,14
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.826.315.400	4.534.820.000	6.087.820.000	4.283.528.300	93.441.800	4.522.212.973	5.909.257.244	536.529.219	1,37%	99,72%	97,07%	12,53%	-9,65	1559,79
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	130.015.000	105.209.000	132.600.000	100.749.000	129.704.981	104.164.684	130.019.002	99.605.519	99,76%	99,01%	98,05%	98,87%	-5,69	-6,09
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	172.690.200	56.166.800	63.580.000	17.756.000	171.623.719	56.142.487	62.524.246	17.582.900	99,38%	99,96%	98,34%	99,03%	-42,12	-42,60
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	193.185.225	181.608.000	244.000.000	136.596.600	193.156.177	181.549.700	241.185.969	133.671.715	99,98%	99,97%	98,85%	97,86%	-5,22	-5,91
Fasilitasi Bantuan Hukum	244.650.000	283.237.000	336.000.000	181.012.970	242.689.400	280.941.500	328.214.400	180.619.450	99,20%	99,19%	97,68%	99,78%	-3,91	-4,13
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	189.578.600	184.472.000	182.500.000	143.831.000	187.330.500	178.918.500	178.765.850	143.299.683	98,81%	96,99%	97,95%	99,63%	-8,32	-8,14



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	417.522.000	337.636.000	102.000.000	39.398.800	417.515.000	337.243.243	78.932.966	33.369.700	100,00%	99,88%	77,39%	84,70%	-50,10	-51,18
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	132.194.000	64.889.000	105.970.000	23.703.000	122.961.100	64.889.000	101.875.800	23.699.700	93,02%	100,00%	96,14%	99,99%	-21,75	-22,32
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	70.222.900	76.589.000	81.600.000	13.231.000	67.945.200	76.589.000	76.088.820	11.817.100	96,76%	100,00%	93,25%	89,31%	-22,73	-24,13
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.894.700	135.141.000	88.200.000	30.189.000	134.853.704	134.471.471	83.884.226	29.004.528	89,37%	99,50%	95,11%	96,08%	-36,98	-34,44
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	133.667.875	71.784.000	81.600.000	14.353.000	119.846.375	71.566.957	67.514.855	14.332.116	89,66%	99,70%	82,74%	99,85%	-38,34	-41,57
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	91.099.675	94.282.000	101.600.000	26.069.900	85.446.175	93.679.411	100.938.039	23.484.515	93,79%	99,36%	99,35%	90,08%	-21,03	-19,78
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.239.445.425	271.292.170	276.850.150	178.971.100	154.506.872	238.619.250	245.420.883	169.879.850	12,47%	87,96%	88,65%	94,92%	-37,14	8,84
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	127.933.025	80.685.000	132.600.000	38.526.900	71.273.125	79.861.050	129.239.585	37.773.286	55,71%	98,98%	97,47%	98,04%	-14,51	1,04
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	245.294.725	204.054.500	203.600.000	62.381.800	209.309.283	186.205.750	197.977.608	58.473.710	85,33%	91,25%	97,24%	93,74%	-28,80	-25,06
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	56.850.400	72.020.000	131.600.000	396.614.000	56.836.800	67.059.000	130.068.400	393.917.610	99,98%	93,11%	98,84%	99,32%	103,60	104,93
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	56.845.400	149.500.000	81.600.000	34.006.200	56.705.400	138.626.900	81.233.274	30.919.700	99,75%	92,73%	99,55%	90,92%	19,75	13,71
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	58.289.000	67.049.000	81.600.000	34.923.000	58.283.400	61.156.600	79.254.700	31.795.300	99,99%	91,21%	97,13%	91,04%	-6,82	-8,45
	42.683.658.942	41.264.579.399	41.535.386.527	32.913.614.485	17.036.385.216	37.104.146.973	39.544.257.938	28.115.135.950	39,91%	89,92%	95,21%	85,42%	-7,81	31,82

Sumber : Laporan Keuangan



Analisis terhadap rasio antara realisasi dan anggaran pada periode Tahun 2021–2024 menunjukkan adanya variasi capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah. Secara umum, capaian realisasi terhadap anggaran pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dikategorikan **baik**, dengan persentase rata-rata realisasi berada pada kisaran 90–95 persen. Sementara itu, pada Tahun 2021 dan terutama pada Tahun 2024, masih terdapat sejumlah kegiatan dengan realisasi yang **kurang optimal** sehingga berdampak pada menurunnya efektivitas capaian pendanaan.

1. Tahun dengan Kinerja Baik

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, sebagian besar kegiatan menunjukkan rasio realisasi terhadap anggaran mendekati 100 persen. Kegiatan yang menunjukkan capaian baik di antaranya adalah:

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyusunan Laporan Kinerja;
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; dan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran lebih realistis dan progres pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Tahun dengan Kinerja Kurang Baik

Pada Tahun 2021, terdapat kegiatan dengan realisasi yang rendah, seperti *Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* dengan rasio 12,47 persen dan *Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* dengan rasio 1,37 persen. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh adanya hambatan prosedural, perubahan kebijakan, maupun keterbatasan pelaksanaan kegiatan di awal periode.

Pada Tahun 2024, capaian realisasi kembali menurun pada beberapa kegiatan, antara lain *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* dengan rasio 49,65 persen, *Pengamanan Barang Milik Daerah* dengan rasio 0 persen, serta *Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah* dengan rasio 0 persen. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan fisik, keterlambatan proses administrasi, maupun perubahan kebijakan pada tahun berjalan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendanaan

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi baik atau kurang baiknya kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain:

1. **Prosedur dan Mekanisme Anggaran:** keterlambatan penetapan maupun perubahan DPA/RKA-SKPD berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan;



2. **Jumlah dan Kualitas Personil (SDM):** keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis program;
 3. **Progres Pelaksanaan Program:** kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa cenderung memiliki risiko deviasi lebih tinggi dibandingkan kegiatan administratif rutin;
 4. **Kebijakan dan Regulasi:** perubahan prioritas, refocusing anggaran, maupun penyesuaian kebijakan nasional/daerah berimplikasi pada capaian realisasi;
 5. **Aspek Teknis dan Administratif:** keterlambatan verifikasi, pengujian, maupun kontraktual dengan pihak ketiga dapat menurunkan capaian realisasi.
4. Potensi dan Permasalahan
- **Potensi:** kegiatan rutin dan administratif, seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan keuangan, serta dukungan operasional pemerintahan, umumnya mencapai rasio realisasi ≥ 95 persen. Hal ini mencerminkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi dasar pemerintahan dengan baik;
 - **Permasalahan:** kegiatan dengan sifat kompleks, terutama pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, dan kegiatan tambahan, masih menunjukkan deviasi yang cukup tinggi. Kondisi ini menegaskan perlunya perencanaan yang lebih akurat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan prosedur administrasi agar efektivitas pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah semakin optimal di masa mendatang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:



Tabel. 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Tata Pemerintahan	membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah	Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Desa, Masyarakat
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Organisasi Keagamaan, Lembaga Sosial, Masyarakat
3	Bagian Hukum	membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi	Perangkat Daerah, Aparatur, Masyarakat, Lembaga Hukum



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam	BUMD, BLUD, Pelaku Usaha, Masyarakat
5	Bagian Administrasi Pembangunan	membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan	Perangkat Daerah, Aparatur, Masyarakat
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Perangkat Daerah, Penyedia Barang/Jasa, Aparatur
7	Bagian Umum	membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten,



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	
8	Bagian Organisasi	membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, ASN, Masyarakat
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi	Pimpinan Daerah, Tamu Kedinasan, Media, Masyarakat
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten,

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sangat beragam, meliputi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, lembaga sosial dan keagamaan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas. Keberagaman sasaran ini menunjukkan bahwa layanan Sekretariat Daerah tidak hanya berorientasi ke dalam (internal



pemerintahan), tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

- Bidang Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Organisasi memiliki sasaran utama pada **Perangkat Daerah dan Aparatur** sebagai mitra kerja strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Bagian Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melayani kelompok sasaran yang lebih luas, yakni **organisasi keagamaan, lembaga sosial, pelaku usaha, dan masyarakat**.
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melibatkan interaksi antara **Perangkat Daerah dan pihak eksternal (penyedia barang/jasa)**.
- Bagian Umum serta Bagian Perencanaan dan Keuangan lebih berorientasi pada pelayanan internal bagi **Sekretaris Daerah, staf ahli, dan asisten**.
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berfokus pada pelayanan keprotokolan dan komunikasi yang mencakup **pimpinan daerah, tamu kedinasan, media, serta masyarakat**.

Dengan demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki peran strategis sebagai fasilitator, koordinator, sekaligus motor penggerak yang menjembatani kepentingan internal pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini mempertegas kedudukan Sekretariat Daerah sebagai institusi yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat	Sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional	Koordinasi perencanaan, fasilitasi kebijakan, dan



No	Mitra Perangkat Daerah	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
			dukungan pembinaan regulasi
2	Kejaksaan Negeri Bengkayang	Harmonisasi kebijakan dan penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum	Pendampingan hukum, legislasi, pengawasan, dan penyesuaian kebijakan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menjalin kemitraan strategis dengan perangkat daerah vertikal sebagai mitra layanan.

Kemitraan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat diarahkan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional. Layanan yang diberikan meliputi koordinasi perencanaan, fasilitasi kebijakan, serta dukungan pembinaan regulasi sehingga kebijakan daerah yang ditetapkan dapat selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi serta memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Selanjutnya, kemitraan dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang difokuskan pada harmonisasi kebijakan dan penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum. Jenis layanan yang diberikan mencakup pendampingan hukum, dukungan dalam penyusunan legislasi, fungsi pengawasan, serta penyesuaian kebijakan daerah. Melalui layanan tersebut, penyusunan peraturan daerah dapat dilakukan secara tertib, sesuai prinsip legal drafting, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, pola kemitraan ini merupakan bagian integral dari strategi Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum, yang pada akhirnya akan memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan



masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

Tabel 2.8 Dukungan BUMD

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1	PERUMDAM Tirta Bengkayang	Penyediaan layanan air bersih yang berkualitas, perluasan jaringan distribusi, serta mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak
2	Bumi Sebalu Mandiri	Pengelolaan potensi sumber daya lokal, dukungan terhadap usaha mikro dan sektor perdagangan, serta kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
3	PT. Membangun Bengkayang Mandiri	Investasi dan kerjasama pengembangan infrastruktur serta unit usaha strategis daerah, guna memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta mendorong percepatan pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi instrumen penting dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang. BUMD tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik, memperkuat perekonomian lokal, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertama, PERUMDAM Tirta Bengkayang berperan sentral dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan air bersih yang berkualitas, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar yang memadai.

Kedua, BUMD Bumi Sebalu Mandiri difokuskan pada pengelolaan potensi sumber daya lokal, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, sektor perdagangan, dan sektor-sektor produktif lainnya. BUMD



ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah serta memperbesar sumbangan terhadap PAD, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, PT. Membangun Bengkayang Mandiri diarahkan untuk memperkuat investasi dan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur serta unit usaha strategis daerah. Keberadaan perusahaan daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam membuka peluang investasi baru, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Dengan demikian, sinergi antara Pemerintah Daerah dan BUMD menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

Tabel 2.9 Kerja Sama Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama 1
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
2	Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Bengkayang	Kerja sama pelayanan publik lintas batas
3	Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	Dukungan program prioritas nasional
4	Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	Kajian akademik kebijakan daerah
5	Dunia Usaha/Swasta	Public Private Partnership (PPP)



6	Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat
7	Media Massa dan Komunitas Informasi	Diseminasi informasi publik

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memegang peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal berbagai bentuk kerja sama agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Bentuk kerja sama tersebut mencakup sinkronisasi perencanaan, peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi pelayanan publik lintas daerah, hingga penguatan promosi potensi daerah. Melalui kerja sama yang terstruktur dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota sekitar, pemerintah pusat, perguruan tinggi, swasta, media, organisasi masyarakat, maupun mitra internasional, diharapkan tercapai efektivitas pelaksanaan program daerah. Evaluasi secara berkala terhadap capaian kerja sama juga menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan, akuntabilitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
3	Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
4	Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan serta batas wilayah sesuai kewenangan daerah	Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan serta batas wilayah sesuai kewenangan daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
5	Belum optimalnya kerjasama daerah	Belum optimalnya kerjasama daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
6	Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam	Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi,



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	kehidupan sosial dan keagamaan	dan keagamaan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
7	Belum optimalnya rumusan kebijakan bidang budaya, pendidikan dan kesehatan	Belum optimalnya rumusan kebijakan bidang budaya, pendidikan dan kesehatan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
8	Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi, lembaga dan ormas keagamaan	Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi, lembaga dan ormas keagamaan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
9	Belum optimalnya inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Belum optimalnya inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
10	Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum	Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
11	Belum optimalnya kebijakan bantuan dan keberpihakan hukum dan HAM	Belum optimalnya kebijakan bantuan dan keberpihakan hukum dan HAM, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
12	Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah	Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
13	Masih belum optimalnya penataan dan permasalahan perekonomian	Masih belum optimalnya penataan dan permasalahan perekonomian, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
14	Kurangnya SDM pengolah data dan analisis perekonomian	Kurangnya SDM pengolah data dan analisis perekonomian, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
15	Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian	Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		hasil yang dicapai belum optimal.	yang belum memadai.
16	Penyusunan program pembangunan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan yang kurang mempedomani petunjuk teknis dan keterbatasan dalam penganggaran	Penyusunan program pembangunan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan yang kurang mempedomani petunjuk teknis dan keterbatasan dalam penganggaran, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
17	Belum optimalnya kebijakan penyusunan RUP sesuai aturan	Belum optimalnya kebijakan penyusunan RUP sesuai aturan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
18	Regulasi LPSE yang dinamis memerlukan penyesuaian cepat	Regulasi LPSE yang dinamis memerlukan penyesuaian cepat, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
19	Masih belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Masih belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
20	Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan	Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
21	Kurangnya sarana prasarana pendukung pengadaan	Kurangnya sarana prasarana pendukung pengadaan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
22	Belum optimalnya personil UKPBJ yang profesional dan mandiri	Belum optimalnya personil UKPBJ yang profesional dan mandiri, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
23	Sulitnya persyaratan kompetensi untuk lulus menjadi JF PPBJ	Sulitnya persyaratan kompetensi untuk lulus menjadi JF PPBJ, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
24	Kurang tertariknya ASN menjadi JF PPBJ karena risiko hukum dan beban kerja	Kurang tertariknya ASN menjadi JF PPBJ karena risiko hukum dan beban kerja, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			yang belum memadai.
25	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana prasarana aparatur, administrasi kepegawaian	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana prasarana aparatur, administrasi kepegawaian, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
26	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
27	Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
28	Ketidakterpaduan data kepegawaian dan dokumen kepegawaian secara digital	Ketidakterpaduan data kepegawaian dan dokumen kepegawaian secara digital, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
29	Rendahnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi	Rendahnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi, sehingga kinerja belum berjalan	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi,



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
30	Masih ditemukan praktik administrasi manual yang lambat dan tidak efisien	Masih ditemukan praktik administrasi manual yang lambat dan tidak efisien, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
31	Belum optimalnya kebijakan teknis analisis jabatan	Belum optimalnya kebijakan teknis analisis jabatan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
32	Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan publik	Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan publik, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
33	Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
34	Masih rendahnya penilaian zona integritas,	Masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD	birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
35	Jumlah dan kualitas SDM bidang organisasi masih terbatas	Jumlah dan kualitas SDM bidang organisasi masih terbatas, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
36	Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja belum memadai	Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja belum memadai, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
37	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
38	Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan	Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
39	Belum optimalnya kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	Belum optimalnya kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
40	Belum optimalnya kebijakan penyampaian informasi dan publikasi kegiatan KDH dan WKDH	Belum optimalnya kebijakan penyampaian informasi dan publikasi kegiatan KDH dan WKDH, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
41	Belum optimalnya kebijakan pengaturan akomodasi dan pengamanan acara tamu	Belum optimalnya kebijakan pengaturan akomodasi dan pengamanan acara tamu, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
42	Belum optimalnya kebijakan pengaturan jadwal kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan KDH dan WKDH	Belum optimalnya kebijakan pengaturan jadwal kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan KDH dan WKDH, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
43	Belum optimalnya pengelolaan retribusi	Belum optimalnya pengelolaan retribusi, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana



No	Permasalahan Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			yang belum memadai.
44	Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan	Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
45	Belum optimalnya inventarisasi aset dan tindaklanjut atas temuan sekretariat daerah	Belum optimalnya inventarisasi aset dan tindaklanjut atas temuan sekretariat daerah, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
46	Belum maksimalnya koordinasi antar bagian sekretariat dalam proses perencanaan	Belum maksimalnya koordinasi antar bagian sekretariat dalam proses perencanaan, sehingga kinerja belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum optimal.	Keterbatasan SDM, koordinasi yang lemah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta regulasi dan sarana prasarana yang belum memadai.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, dapat disimpulkan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya koordinasi antar bagian maupun dengan perangkat daerah lain, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan regulasi, sarana, dan prasarana pendukung. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta dukungan administratif bagi kepala daerah.



Adapun permasalahan pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat diuraikan ke dalam beberapa kelompok besar sebagai berikut:

1. **Bagian Tata Pemerintahan**

- Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah belum berjalan optimal;
- Kapasitas dan kualitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan masih terbatas;
- Penataan capaian kinerja pemerintahan daerah belum sistematis;
- Inventarisasi data wilayah, batas wilayah, serta kerja sama daerah belum terkelola dengan baik.

2. **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

- Potensi risiko sosial dan keagamaan belum terinventarisasi secara menyeluruh;
- Rumusan kebijakan bidang budaya, pendidikan, dan kesehatan belum optimal;
- Data rumah ibadah, organisasi keagamaan, serta lembaga sosial belum tersedia lengkap;
- Inventarisasi dan pemberian bantuan sosial-keagamaan masih belum efektif.

3. **Bagian Hukum**

- Keterbatasan tenaga penyusunan dan publikasi produk hukum.
- Kebijakan bantuan hukum dan HAM masih lemah.
- Monitoring dan evaluasi produk hukum daerah belum maksimal.

4. **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

- Penataan kebijakan perekonomian daerah belum optimal.
- SDM pengolah data dan analisis ekonomi masih terbatas.
- Koordinasi dan pelaporan kegiatan ekonomi belum efektif.

5. **Bidang Administrasi Pembangunan**

- Penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai pedoman teknis.

6. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

- Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) masih kurang sesuai aturan;
- Regulasi LPSE yang dinamis belum diimbangi dengan adaptasi cepat;
- Profesionalisme dan jumlah personil UKPBJ masih terbatas;



- ASN kurang berminat menjadi JF PPBJ karena beban kerja dan risiko hukum yang tinggi.

7. **Bagian Umum**

- Fasilitasi sarana prasarana aparatur, administrasi kepegawaian, dan pemeliharaan kantor belum optimal;
- Administrasi kepegawaian masih manual dan belum terintegrasi digital;
- Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah.

8. **Bagian Organisasi**

- Kebijakan teknis analisis jabatan belum optimal.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik belum merata.
- Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah belum berjalan baik.
- Reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas masih rendah.
- Kapasitas SDM bidang organisasi masih terbatas.

9. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

- Peliputan, dokumentasi, penyampaian informasi, dan publikasi kegiatan kepala daerah belum optimal;
- Pengaturan akomodasi, pengamanan acara, serta jadwal kegiatan yang melibatkan kepala daerah masih lemah.

10. **Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Pengelolaan retribusi dan administrasi keuangan belum sesuai aturan;
- Inventarisasi aset dan tindak lanjut temuan masih terbatas;
- Koordinasi antarbagian dalam proses perencanaan belum maksimal.

2.2.2 **Isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama. Isu-isu ini berhubungan erat dengan peran Setda sebagai koordinator administrasi pemerintahan, penggerak kebijakan strategis daerah, serta fasilitator dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Isu strategis yang relevan bagi Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, menjadi isu penting yang harus



ditangani. Masih adanya kelemahan koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi, serta belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi, menuntut peran Setda dalam mendorong perbaikan sistem tata kelola dan budaya kerja birokrasi.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat Masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pelayanan publik di seluruh perangkat daerah selaras, serta melakukan pengawasan dan pembinaan agar standar pelayanan minimal (SPM) dapat terpenuhi.
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah Tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur dengan kompetensi yang sesuai, belum optimalnya manajemen ASN, serta perlunya penataan kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah, menjadi isu strategis yang memerlukan peran Setda dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM dan kelembagaan.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data yang akurat, sinkronisasi antar perangkat daerah yang belum maksimal, serta perlunya integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Sekretariat Daerah berperan penting dalam memastikan keselarasan kebijakan, arah pembangunan, dan efektivitas implementasi program daerah.
5. Penguatan Fungsi Administrasi, Keuangan, dan Keprotokolan Pemerintahan
Pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan daerah, serta urusan keprotokolan masih menghadapi kendala dalam hal ketertiban administrasi, kepatuhan regulasi, serta efektivitas pelaksanaan fungsi pendukung pimpinan daerah. Sekretariat Daerah dituntut untuk memperkuat sistem tata administrasi pemerintahan yang lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.
6. Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan Strategis Dinamika politik, kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks menjadi isu strategis yang harus diantisipasi. Sekretariat Daerah harus mampu menjadi motor koordinasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, termasuk dalam mendorong inovasi, digitalisasi layanan, dan responsivitas kebijakan.



Dengan demikian, isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 dapat dirangkum dalam fokus utama yaitu: penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan SDM aparatur, sinkronisasi perencanaan pembangunan, optimalisasi fungsi administrasi pemerintahan, serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Seluruh isu strategis ini akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Sekretariat Daerah pada periode perencanaan lima tahun mendatang.

Tabel. 2.11 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 2025–2029

Isu Strategis	Keterkaitan dengan Tugas Pokok & Fungsi Setda	Implikasi terhadap Renstra Setda
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Setda berfungsi sebagai koordinator administrasi pemerintahan, pengendali kebijakan, serta pembina perangkat daerah.	Perlu mendorong implementasi reformasi birokrasi, peningkatan koordinasi lintas OPD, dan penguatan sistem Monev kinerja.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat	Setda memiliki peran dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik, memfasilitasi standar pelayanan minimal (SPM), dan mengawasi pelaksanaannya.	Perlu strategi pembinaan pelayanan publik di OPD, pengembangan inovasi pelayanan, serta monitoring kepuasan masyarakat.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah	Setda bertugas dalam perumusan kebijakan manajemen ASN, kelembagaan, serta tata kerja pemerintahan.	Perlu perbaikan manajemen SDM aparatur, penyusunan formasi yang sesuai kebutuhan, dan penataan kelembagaan adaptif.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Setda menjadi fasilitator sinkronisasi program/kegiatan antar OPD serta antara pemerintah daerah dengan provinsi/nasional.	Perlu penguatan integrasi perencanaan, pemanfaatan data yang akurat, serta peningkatan efektivitas koordinasi perencanaan lintas sektor.
Penguatan Fungsi Administrasi, Keuangan, dan Keprotokolan Pemerintahan	Setda berperan dalam mendukung administrasi umum, pengelolaan keuangan daerah, serta layanan keprotokolan bagi pimpinan daerah.	Perlu perbaikan tata kelola administrasi, peningkatan kepatuhan regulasi keuangan, serta optimalisasi layanan keprotokolan.
Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	Setda sebagai motor koordinasi kebijakan harus responsif terhadap dinamika politik, kebijakan nasional,	Perlu pengembangan sistem digital pemerintahan, inovasi kebijakan, serta



	dan perkembangan teknologi informasi.	peningkatan kapasitas responsif terhadap isu global/nasional.
--	---------------------------------------	---

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang melakukan telaahan terhadap dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Setda. Telaahan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas koordinasi, fasilitasi, administrasi pemerintahan, serta dukungan manajerial Setda tetap berada dalam koridor kebijakan pembangunan nasional.

Beberapa Renstra K/L yang menjadi acuan utama antara lain:

1. Kementerian PAN-RB menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Setda dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan penguatan tata kelola pemerintahan daerah, penataan kelembagaan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Setda berperan penting dalam memastikan keterpaduan kebijakan dan koordinasi antar perangkat daerah.
3. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus pada pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan, disiplin fiskal, serta efektivitas belanja daerah. Relevan dengan fungsi Setda dalam mendukung akuntabilitas APBD dan pengelolaan aset daerah.
4. Bappenas menekankan sinkronisasi perencanaan pusat-daerah serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Setda harus menjamin konsistensi perencanaan daerah dengan RPJMN dan RPJMD.
5. Kementerian Kominfo mendorong transformasi digital pemerintahan, penguatan SPBE, serta transparansi berbasis teknologi informasi. Relevan untuk mendukung digitalisasi administrasi, arsip, dan pelayanan publik di Setda.
6. Kemenko Polhukam menekankan stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Setda berperan sebagai fasilitator hubungan pemerintahan daerah dengan Forkopimda, serta memastikan kelancaran komunikasi politik dan hukum daerah.
7. BNPB & KLHK fokus pada ketahanan bencana, adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kualitas lingkungan hidup. Relevansi dengan Setda adalah koordinasi lintas sektor dalam mitigasi risiko bencana, pengarusutamaan



pembangunan berkelanjutan, serta dukungan regulasi daerah terkait lingkungan.

8. Kemenko Perekonomian menekankan peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah melalui investasi, penguatan BUMD, serta pemanfaatan potensi unggulan daerah. Setda perlu mendukung kebijakan investasi daerah melalui regulasi dan koordinasi lintas OPD.
9. Kementerian PUPR fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar, perumahan, konektivitas wilayah, serta infrastruktur perbatasan. Setda berperan dalam fasilitasi koordinasi, perencanaan, dan penyusunan regulasi pendukung untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Dengan demikian, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 2025–2029 telah selaras dengan sasaran Renstra K/L, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, kelembagaan, maupun adaptasi terhadap isu lingkungan, daya saing daerah, dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Tabel. 2.12. Tabel Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif (KemenPAN-RB)	Implementasi budaya kerja belum konsisten, inovasi terbatas, pemanfaatan e-gov belum optimal.	Kebijakan nasional RB, regulasi daerah, SDM yang mulai memahami RB.	Resistensi perubahan, keterbatasan aparatur, sarpras digital terbatas.
Peningkatan kualitas pelayanan publik (KemenPAN-RB & Kemendagri)	Sistem pelayanan belum terintegrasi antar-bagian Setda.	Adanya SPM, regulasi SPBE, komitmen pimpinan.	Keterbatasan TI dan anggaran inovasi layanan.
Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat-daerah (Bappenas & Kemendagri)	RPJMD belum sepenuhnya terhubung dengan RPJMN; data sektoral belum konsisten.	RPJMD 2025–2029, koordinasi dengan provinsi, e-planning.	Lemahnya Monev lintas OPD, data kurang akurat.
Stabilitas politik, hukum, dan keamanan	Peran Setda masih administratif	Regulasi UU Penda,	Dinamika politik lokal, kewenangan



(Kemendagri & Kemenko Polhukam)	dalam fasilitasi urusan politik/hukum.	koordinasi Forkopimda.	teknis Setda terbatas.
Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan (Kemenkeu)	Transparansi & efisiensi anggaran belum optimal; inventarisasi aset lemah.	Dukungan SAKIP, SIPD, regulasi keuangan.	Kapasitas ASN keuangan bervariasi, regulasi sering berubah.
Transformasi digital & SPBE (Kominfo)	Administrasi Setda masih banyak manual, data belum terintegrasi.	Program SPBE nasional, dorongan digitalisasi publik.	Keterbatasan infrastruktur TI, literasi digital ASN rendah.
Ketahanan bencana & lingkungan hidup berkelanjutan (BNPB & KLHK)	Mitigasi risiko bencana dan isu lingkungan belum terintegrasi dalam perencanaan.	Regulasi nasional soal iklim & lingkungan, dukungan KLHS RPJMD.	Keterbatasan koordinasi lintas sektor, dana terbatas untuk mitigasi.
Peningkatan daya saing & kemandirian ekonomi daerah (Kemenko Perekonomian)	Investasi belum optimal, BUMD kurang kuat, potensi SDA belum termanfaatkan penuh.	Potensi sektor unggulan daerah, kebijakan investasi nasional.	Kelembagaan investasi belum optimal, keterbatasan SDM pengelola ekonomi.
Pemenuhan infrastruktur dasar & konektivitas wilayah (Kementerian PUPR)	Infrastruktur dasar & perbatasan belum merata, koordinasi pembangunan terbatas.	Program infrastruktur nasional, dukungan dana transfer pusat.	Keterbatasan fiskal daerah, keterlambatan koordinasi lintas sektor.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

Telaahan terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara prioritas nasional dengan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Beberapa permasalahan yang dihadapi perangkat daerah umumnya terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta masih perlunya penguatan sistem koordinasi lintas sektor. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor pendukung berupa regulasi nasional, arahan kebijakan pusat, serta dukungan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Dengan adanya sinkronisasi sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dengan Renstra Sekretariat Daerah, diharapkan permasalahan yang muncul



dapat diatasi melalui langkah-langkah strategis yang mengoptimalkan faktor pendukung dan meminimalisir hambatan yang ada. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah ini sekaligus akan meningkatkan efektivitas perencanaan, tata kelola pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang pada periode perencanaan 2025–2029.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Barat dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Berikut ini merupakan telaahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang terhadap Renstra Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian program lintas perangkat daerah masih belum optimal di tingkat kabupaten	- Dukungan regulasi nasional & provinsi (SPBE, Reformasi Birokrasi) - Tersedianya SDM aparatur di Setda Bengkayang	- Keterbatasan kapasitas SDM dalam perencanaan & evaluasi - Sistem informasi manajemen belum terintegrasi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Masih terdapat keluhan terkait keterlambatan layanan administrasi & koordinasi antarbagian	- Adanya komitmen peningkatan pelayanan publik - Dukungan kebijakan provinsi terkait pelayanan berbasis digital	- Sarana prasarana pelayanan publik terbatas - Budaya kerja belum sepenuhnya adaptif pada digitalisasi



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Koordinasi antarbagian dalam penyusunan kebijakan daerah masih parsial dan belum sepenuhnya sinkron dengan arah provinsi	- Tugas pokok Setda sebagai koordinator kebijakan - Dukungan supervisi dari Biro/Bagian di tingkat provinsi	- Keterbatasan forum koordinasi lintas level pemerintahan - Belum optimalnya peran monitoring & evaluasi
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah	Struktur organisasi masih perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah serta keterbatasan kompetensi ASN	- Adanya kebijakan pembinaan kelembagaan dan ASN dari provinsi	- Jumlah dan kualitas ASN belum merata di tiap bagian - Terbatasnya anggaran untuk pengembangan SDM
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan masih menghadapi kendala teknis dan koordinasi antarbagian	- Dukungan regulasi provinsi dan pusat terkait pengelolaan keuangan daerah - Sistem SIPD terintegrasi	- Keterbatasan SDM pengelola keuangan yang kompeten - Perubahan regulasi keuangan yang cepat

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telaahan terhadap sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang masih dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Permasalahan ini berkaitan erat dengan faktor pendukung yang tersedia, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang perlu segera mendapatkan perhatian.

Pertama, pada sasaran **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya**, permasalahan utama terletak pada kualitas perencanaan, koordinasi, serta pengendalian program lintas perangkat daerah yang belum optimal. Meskipun telah tersedia dukungan regulasi nasional dan provinsi melalui kebijakan SPBE dan



Reformasi Birokrasi serta tersedianya SDM aparatur, namun kendala yang muncul adalah keterbatasan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan evaluasi serta belum terintegrasinya sistem informasi manajemen.

Kedua, pada sasaran **meningkatkan kualitas pelayanan publik**, masih ditemui keluhan masyarakat terkait keterlambatan layanan administrasi dan lemahnya koordinasi antarbagian. Hal ini terjadi meskipun terdapat komitmen kuat untuk meningkatkan pelayanan publik serta dukungan kebijakan provinsi dalam mendorong layanan berbasis digital. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana prasarana serta budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya adaptif terhadap digitalisasi.

Ketiga, sasaran **meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum** masih terkendala pada koordinasi antarbagian dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat parsial serta belum sepenuhnya sinkron dengan arah kebijakan provinsi. Padahal, tugas pokok Setda sebagai koordinator kebijakan telah didukung oleh mekanisme supervisi dari biro atau bagian di tingkat provinsi. Hambatan yang muncul adalah keterbatasan forum koordinasi lintas level pemerintahan serta belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi.

Keempat, pada sasaran **meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah**, persoalan yang muncul terkait dengan struktur organisasi yang masih perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah serta keterbatasan kompetensi ASN. Meskipun terdapat kebijakan pembinaan kelembagaan dan ASN dari provinsi, masalah mendasar adalah jumlah dan kualitas ASN yang belum merata di tiap bagian serta terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia.

Kelima, sasaran **meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel** menghadapi tantangan pada aspek proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang masih terkendala teknis serta kurang optimalnya koordinasi antarbagian. Walaupun telah tersedia dukungan regulasi dari pusat dan provinsi serta adanya sistem SIPD yang terintegrasi, hambatan tetap muncul karena keterbatasan jumlah SDM pengelola keuangan yang kompeten serta adanya perubahan regulasi keuangan yang berlangsung cepat.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki potensi dukungan regulasi, kebijakan, dan komitmen organisasi yang cukup kuat. Namun demikian, berbagai permasalahan internal terutama terkait kapasitas SDM, keterbatasan



anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi lintas bagian masih menjadi faktor penghambat utama yang perlu segera diatasi melalui strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi fungsi koordinasi lintas perangkat daerah.

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014–2034. RTRW tersebut merupakan pedoman dasar dalam pemanfaatan ruang wilayah yang harus menjadi acuan seluruh perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah.

Dalam konteks penyusunan Renstra Sekretariat Daerah, telaahan terhadap RTRW dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara fungsi koordinasi, administrasi, serta fasilitasi kebijakan dengan arah pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan Sekretariat Daerah akan berimplikasi langsung pada optimalisasi pemanfaatan ruang, keberlanjutan lingkungan, dan dukungan terhadap kawasan strategis.

Adapun telaahan terhadap RTRW terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Dukungan RTRW terhadap pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Bengkayang	Adanya arahan struktur ruang yang menetapkan Sebalo sebagai pusat pemerintahan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang administrasi pemerintahan
2	Penguatan fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI	Kebijakan RTRW yang menegaskan kawasan Jagoi Babang dan Siding sebagai kawasan strategis nasional perbatasan	Keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas menuju kawasan perbatasan



No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3	Dukungan RTRW pada pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	Arahan RTRW untuk pengembangan kawasan perkotaan Sungai Raya, Ledo, dan Samalantan sebagai pusat pelayanan	Ketimpangan pembangunan antar kecamatan, serta keterbatasan anggaran
4	Penataan ruang yang mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Adanya zonasi kawasan lindung, hutan, dan pesisir dalam RTRW	Masih terjadinya alih fungsi lahan serta lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang
5	Sinkronisasi RTRW dengan pembangunan infrastruktur strategis daerah	Arahan pengembangan jaringan transportasi, jalan strategis, dan sarana publik dalam RTRW	Realisasi pembangunan infrastruktur belum sejalan dengan rencana tata ruang

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

Berdasarkan telaahan di atas, terdapat beberapa poin penting:

1. Dukungan pemerintah Kabupaten Bengkayang memberikan dasar hukum bagi penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, namun masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Penguatan kawasan perbatasan menjadi bagian dari kepentingan nasional, sehingga Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam koordinasi lintas sektor dan lintas batas, terutama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar.
3. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang diatur dalam RTRW mendukung pemerataan pelayanan publik, meskipun masih menghadapi kendala ketimpangan pembangunan antarwilayah.
4. Penataan ruang berkelanjutan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, namun pengendalian alih fungsi lahan masih menjadi tantangan serius.
5. Sinkronisasi RTRW dengan pembangunan infrastruktur strategis sangat relevan bagi upaya percepatan konektivitas dan pelayanan masyarakat, walaupun dalam pelaksanaannya sering tidak sejalan dengan perencanaan ruang.



Dengan demikian, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong sinkronisasi kebijakan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta memastikan implementasi RTRW selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, isu lingkungan hidup menjadi salah satu aspek kunci yang harus diperhatikan untuk menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus menelaah hasil KLHS yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RPJMD.

Berdasarkan hasil telaahan, terdapat sejumlah isu strategis KLHS dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya dalam aspek koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan integrasi perencanaan lintas sektor.

Hasil Analisis terhadap Isu KLHS

1. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

RPJMD Bengkayang menekankan kerentanan wilayah terhadap banjir, longsor, dan kekeringan akibat perubahan iklim.

Relevansi bagi Setda: berperan dalam koordinasi lintas OPD untuk memastikan mitigasi dan adaptasi bencana diintegrasikan dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2. Pencemaran Lingkungan

Isu pencemaran air, tanah, dan udara yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat menjadi perhatian dalam RPJMD.

Relevansi bagi Setda: memastikan sinergi kebijakan, regulasi, dan pengawasan pembangunan agar pencemaran dapat ditekan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan

RPJMD menyoroti potensi degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung.

Relevansi bagi Setda: memfasilitasi koordinasi kebijakan lintas sektor agar pemanfaatan SDA konsisten dengan prinsip keberlanjutan.

4. Keterpaduan Perencanaan (KLHS–RTRW–RPJMD)

RPJMD menekankan pentingnya integrasi dokumen perencanaan agar konsisten dengan daya dukung lingkungan.

Relevansi bagi Setda: menjadi penghubung antar-OPD untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan KLHS dan RTRW.



2.2.2.5 Telaah Isu Global

Pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Bengkayang, tidak dapat dilepaskan dari dinamika global. Arus globalisasi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta transformasi sosial-ekonomi dunia memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah perlu menelaah isu global yang relevan untuk memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan tetap sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Isu Global yang Relevan bagi Sekretariat Daerah

1. **Perubahan Iklim dan Agenda SDGs 2030**

Tekanan global untuk menurunkan emisi karbon, memperkuat adaptasi bencana, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Implikasi untuk Setda: memastikan integrasi SDGs ke dalam kebijakan daerah dan koordinasi lintas OPD terkait adaptasi-mitigasi.

2. **Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0**

Perkembangan teknologi global menuntut digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Implikasi untuk Setda: memperkuat SPBE, e-government, serta pelayanan publik berbasis digital.

3. **Krisis Kesehatan Global (Pandemi dan Pasca-Pandemi)**

Ancaman kesehatan global menuntut kesiapsiagaan sistem pelayanan publik dan birokrasi.

Implikasi untuk Setda: koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sistem layanan dasar dan kebijakan mitigasi kesehatan.

4. **Ketidakpastian Ekonomi Global**

Fluktuasi harga komoditas, inflasi global, dan ketidakpastian rantai pasok memengaruhi daya saing daerah.

Implikasi untuk Setda: memastikan koordinasi program ekonomi daerah yang adaptif, kolaborasi investasi, dan fasilitasi kerja sama daerah.

5. **Isu Tata Kelola dan Transparansi Global**

Standar tata kelola internasional menekankan akuntabilitas, integritas, dan keterbukaan informasi.

Implikasi untuk Setda: penguatan reformasi birokrasi, integritas aparatur, dan implementasi zona integritas di lingkup pemerintahan.

Telaahan isu global menunjukkan bahwa Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 2025–2029 harus berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan global, baik dalam aspek perubahan iklim, transformasi digital, kesehatan, ekonomi, maupun transparansi. Hal ini memastikan bahwa peran Setda tidak hanya



administratif, tetapi juga strategis dalam menjembatani agenda global ke dalam konteks pembangunan daerah.

2.2.2.6 Telaah Isu Nasional

Isu-isu nasional yang berkembang di Indonesia memiliki pengaruh langsung terhadap arah pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan agenda besar nasional, antara lain percepatan reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Bagi Kabupaten Bengkayang, penyesuaian dengan agenda nasional sangat penting agar arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan kebijakan nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah sebagai unsur koordinasi pemerintahan berperan strategis untuk memastikan bahwa isu-isu nasional dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan daerah.

Isu Nasional yang Relevan bagi Setda

1. Reformasi Birokrasi Nasional

Pemerintah pusat menekankan penyederhanaan prosedur, percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implikasi bagi Setda: Sekretariat Daerah perlu memperkuat zona integritas, meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja (SAKIP), serta memperluas digitalisasi administrasi dan layanan publik di lingkup Setda.

2. Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penguatan Perbatasan RPJMN menempatkan pembangunan wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) sebagai prioritas, termasuk kawasan perbatasan. Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Malaysia termasuk dalam fokus pembangunan nasional ini.

Implikasi bagi Setda: Setda harus memastikan koordinasi lintas OPD dalam program pemerataan pembangunan, mendorong infrastruktur dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan, serta memfasilitasi kebijakan afirmatif agar kesenjangan pembangunan dapat dikurangi.

3. Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup

Perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana menuntut kebijakan nasional untuk memperkuat adaptasi dan mitigasi bencana.

Implikasi bagi Setda: Sekretariat Daerah berperan dalam mengoordinasikan integrasi hasil KLHS, memfasilitasi penyusunan kebijakan lingkungan, serta memastikan program pembangunan daerah adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

4. Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Nasional

Pemerintah pusat mendorong investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi hijau sebagai motor pertumbuhan nasional.

Implikasi bagi Setda: Setda harus memfasilitasi koordinasi kebijakan ekonomi daerah, menjalin kemitraan dengan provinsi maupun pusat, serta



mendukung regulasi investasi yang kondusif bagi percepatan ekonomi daerah.

5. Penguatan Sistem Keuangan Daerah

Tata kelola keuangan daerah dituntut semakin transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sesuai regulasi nasional.

Implikasi bagi Setda: Sekretariat Daerah perlu memperkuat perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi kinerja, sehingga APBD dapat dikelola lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Telaahan isu nasional menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bengkayang perlu sejalan dengan agenda besar nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Renstra Sekretariat Daerah 2025–2029 harus responsif terhadap reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan, ketahanan bencana, transformasi ekonomi, serta penguatan tata kelola keuangan. Dengan begitu, Setda Bengkayang dapat memastikan bahwa kebijakan daerah terintegrasi dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

2.2.2.7 Telaah Isu Regional

Kabupaten Bengkayang sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan wilayah perbatasan negara memiliki dinamika regional yang khas. Posisi geografis yang strategis, kondisi sosial budaya yang beragam, serta keterhubungan dengan kabupaten/kota sekitar dan negara tetangga Malaysia menjadikan isu-isu regional sebagai faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan arah kebijakan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, ditegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks regional, baik dalam hal pemerataan pembangunan antarwilayah, pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas infrastruktur, maupun pengelolaan dinamika sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan sinkronisasi perencanaan, berperan strategis dalam mengintegrasikan isu-isu regional ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

Isu Regional yang Relevan bagi Setda

1. Ketimpangan Antarwilayah di Kalimantan Barat

RPJMD 2025–2029 menyoroti masih adanya disparitas pembangunan, terutama dalam akses infrastruktur dasar dan layanan publik antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang sebagai daerah perbatasan juga menghadapi kesenjangan dengan wilayah yang lebih maju.

Implikasi bagi Setda: Sekretariat Daerah perlu mengoordinasikan kebijakan afirmatif, memastikan integrasi program pemerataan pembangunan lintas OPD, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi agar pembangunan di Bengkayang tidak tertinggal.



2. **Pembangunan Kawasan Perbatasan RI–Malaysia**
Kabupaten Bengkayang memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk perdagangan lintas batas, namun juga menuntut perhatian khusus terkait infrastruktur, pelayanan dasar, dan potensi kerawanan sosial-ekonomi.
Implikasi bagi Setda: Setda berperan memfasilitasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, mendorong penguatan kerja sama daerah, serta memastikan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana pendukung perdagangan masuk dalam agenda prioritas daerah.
3. **Konektivitas Infrastruktur Regional**
Salah satu isu utama dalam RPJMD adalah keterbatasan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat. Jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang belum memadai menghambat mobilitas penduduk dan barang serta menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Implikasi bagi Setda: Peran Setda adalah mengoordinasikan sinkronisasi pembangunan infrastruktur dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota tetangga, agar konektivitas Bengkayang mendukung percepatan pembangunan ekonomi, akses layanan dasar, dan integrasi wilayah perbatasan.
4. **Ketahanan Sosial-Budaya dan Keberagaman**
Masyarakat Bengkayang yang multietnis dan multikultural serta berinteraksi dengan masyarakat perbatasan Malaysia memiliki potensi besar dalam memperkaya pembangunan, namun juga berisiko menimbulkan konflik sosial bila tidak dikelola dengan baik.
Implikasi bagi Setda: Sekretariat Daerah perlu memfasilitasi kebijakan penguatan kelembagaan sosial, menjaga kerukunan antarumat beragama dan antaretnis, serta memastikan nilai-nilai budaya lokal terintegrasi dalam pembangunan daerah, demi terjaganya stabilitas sosial dan politik lokal.

Telaahan isu regional sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika regional di Kalimantan Barat. Renstra Setda 2025–2029 harus menempatkan peran koordinasi dan fasilitasi dalam mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat konektivitas infrastruktur, serta menjaga stabilitas sosial-budaya masyarakat. Dengan demikian, Sekretariat Daerah Bengkayang dapat menjalankan fungsinya sebagai *bridging institution* yang menghubungkan kebijakan pusat, provinsi, dan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.



Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Komitmen pembangunan berkelanjutan berbasis good governance	Agenda SDGs: tata kelola transparan, akuntabel	Reformasi birokrasi, SPBE, pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas tata kelola di Kalbar	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan
Penyelenggaraan pemerintahan umum & otonomi daerah	Belum optimal kualitas layanan publik dan kapasitas aparatur	RTRW Bengkayang No. 7/2014, integrasi KLHS	Tuntutan global atas pelayanan publik efektif & efisien	Agenda pemerataan pembangunan dan wilayah 3T	Ketimpangan pembangunan antarwilayah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan adaptif, akuntabel, responsif kebutuhan publik
Pembinaan sosial, keagamaan & kemasyarakatan	Belum optimal pembinaan, inventarisasi, dan pemberian bantuan sosial-keagamaan	Tuntutan peningkatan pelayanan bidang keagamaan	SDGs 16: perdamaian, keadilan, kelembagaan	Penguatan pembinaan sosial & keagamaan	Kerentanan konflik sosial di kawasan perbatasan	Optimalisasi pembinaan & fasilitasi sosial-keagamaan yang inklusif
Penyusunan produk hukum daerah	Masih kurang tenaga penyusun & kualitas produk hukum	Reformasi hukum, pencegahan korupsi	Tuntutan global atas rule of law	Agenda nasional reformasi hukum & HAM	Tumpang tindih aturan pusat-daerah	Optimalisasi penyusunan & evaluasi produk hukum, perlindungan HAM
Koordinasi perekonomian & SDA	Belum tumbuh basis ekonomi unggulan daerah	Pemerataan perekonomian berkelanjutan	Isu global: green economy & SDGs 8	Transformasi ekonomi, investasi & UMKM	Konektivitas ekonomi regional Kalbar	Penguatan tata kelola ekonomi daerah & investasi produktif



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
Administrasi pembangunan	Penyusunan program belum optimal, kurang integrasi KLHS	Dampak perubahan iklim, penggunaan SDA berkelanjutan	Isu perubahan iklim global	Integrasi KLHS–RPJMD–RTRW	Sinkronisasi pembangunan lintas kabupaten	Optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis lingkungan
Pengadaan barang & jasa	Belum optimal implementasi regulasi & SDM UKPBJ	Tantangan pengadaan berkelanjutan	Isu global: standar pengadaan hijau	Reformasi sistem pengadaan pemerintah	Keterbatasan infrastruktur pendukung	Optimalisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik & ramah lingkungan
Administrasi umum & kepegawaian	Rendahnya kualitas layanan kepegawaian & digitalisasi arsip	Tuntutan pelayanan publik berbasis digital	Revolusi digital & kompetensi ASN global	Transformasi digital ASN nasional	Rendahnya kapasitas SDM pemda Kalbar	Optimalisasi layanan administrasi kepegawaian digital & peningkatan kompetensi ASN
Kelembagaan & organisasi	Belum optimal penataan kelembagaan & kualitas pelayanan publik	Reformasi birokrasi, SAKIP	Agenda global: governance effectiveness	Peningkatan SAKIP & pelayanan publik	Rendahnya nilai SAKIP di Kalbar	Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
Keprotokolan & komunikasi pimpinan	Belum optimal peliputan, dokumentasi, dan komunikasi	Tuntutan keprotokolan modern	Globalisasi komunikasi & diplomasi	Penguatan komunikasi publik nasional	Posisi strategis Bengkayang di perbatasan	Optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan & komunikasi pimpinan



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
Perencanaan & keuangan	Belum optimal pengelolaan retribusi, aset, dan keuangan	Tuntutan tata kelola keuangan yang transparan & akuntabel	Agenda global: transparansi fiskal	Penguatan sistem keuangan daerah	Masih lemahnya akuntabilitas keuangan daerah di Kalbar	Optimalisasi perencanaan & tata kelola keuangan daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029



Berdasarkan hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika isu global, nasional, dan regional, dapat disimpulkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

1. **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan**

Sekretariat Daerah memiliki potensi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. KLHS menekankan pentingnya komitmen pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola yang baik. Secara global, agenda SDGs menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sementara secara nasional, agenda reformasi birokrasi menekankan penyederhanaan prosedur, SPBE, dan pelayanan publik. Di tingkat regional, kualitas tata kelola di Kalimantan Barat masih relatif rendah. Oleh karena itu, isu strategis Setda adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah**

Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya kualitas layanan publik serta kapasitas aparatur. KLHS terkait adalah integrasi RTRW Kabupaten Bengkayang dengan aspek keberlanjutan. Secara global, terdapat tuntutan agar layanan publik lebih efektif dan efisien. Agenda nasional melalui RPJMN menekankan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Secara regional, masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalbar. Dengan demikian, isu strategis Setda adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
3. **Pembinaan Sosial, Keagamaan, dan Kemasyarakatan**

Sekretariat Daerah menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya pembinaan, inventarisasi, dan pemberian bantuan sosial maupun keagamaan. KLHS menekankan pentingnya peningkatan pelayanan bidang keagamaan. Isu global yang relevan adalah SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan. Secara nasional, pemerintah mendorong penguatan pembinaan sosial dan keagamaan, sementara secara regional terdapat kerentanan konflik sosial di wilayah perbatasan. Maka isu strategis adalah optimalisasi pembinaan dan fasilitasi sosial-keagamaan yang inklusif.
4. **Penyusunan Produk Hukum Daerah**

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga penyusun dan masih rendahnya kualitas produk hukum. KLHS menyoroti pentingnya reformasi hukum dan pencegahan korupsi. Secara global, tuntutan terhadap rule of law semakin menguat, sedangkan secara nasional agenda



reformasi hukum dan HAM menjadi prioritas. Secara regional, masih terjadi tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, isu strategis adalah optimalisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum serta perlindungan HAM.

5. Koordinasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
Potensi daerah masih belum berkembang maksimal karena belum tumbuhnya basis ekonomi unggulan. KLHS menekankan pemerataan perekonomian yang berkelanjutan. Secara global, tuntutan terhadap green economy (SDGs 8) semakin meningkat, sementara nasional menekankan transformasi ekonomi, investasi, dan UMKM. Secara regional, Kalbar menghadapi masalah konektivitas ekonomi antardaerah. Maka isu strategis adalah penguatan tata kelola ekonomi daerah dan investasi produktif.
6. Administrasi Pembangunan
Permasalahan yang muncul adalah penyusunan program pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan KLHS. Isu KLHS menekankan dampak perubahan iklim dan penggunaan SDA berkelanjutan. Secara global, isu perubahan iklim menuntut adaptasi kebijakan pembangunan. Nasional mendorong integrasi KLHS–RPJMD–RTRW, sedangkan secara regional masih terdapat tantangan sinkronisasi pembangunan lintas kabupaten. Maka isu strategis adalah optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis lingkungan.
7. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Permasalahan utama adalah belum optimalnya implementasi regulasi serta keterbatasan SDM UKPBJ. KLHS mengingatkan pentingnya pengadaan berkelanjutan. Global menekankan standar green procurement, nasional melakukan reformasi sistem pengadaan pemerintah, sedangkan regional menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung. Maka isu strategis adalah optimalisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik dan ramah lingkungan.
8. Administrasi Umum dan Kepegawaian
Masalah yang dihadapi adalah rendahnya kualitas layanan kepegawaian serta minimnya digitalisasi arsip. KLHS menekankan pentingnya layanan publik berbasis digital. Global menghadirkan tantangan revolusi digital dan kompetensi ASN, nasional mendorong transformasi digital ASN, sementara regional menunjukkan kapasitas SDM pemda Kalbar masih rendah. Oleh karena itu, isu strategis adalah optimalisasi layanan administrasi kepegawaian digital dan peningkatan kompetensi ASN.
9. Kelembagaan dan Organisasi
Permasalahan adalah belum optimalnya penataan kelembagaan dan kualitas pelayanan publik. KLHS terkait dengan reformasi birokrasi dan



peningkatan SAKIP. Global menekankan efektivitas governance, nasional mendorong peningkatan kinerja SAKIP, sementara regional menunjukkan nilai SAKIP di Kalbar masih rendah. Maka isu strategis adalah penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.

10. Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan

Permasalahan adalah belum optimalnya peliputan, dokumentasi, dan komunikasi pimpinan. KLHS menuntut keprotokolan modern. Global menekankan diplomasi dan komunikasi publik, nasional menguatkan komunikasi publik, dan secara regional posisi Bengkayang sebagai daerah perbatasan menuntut peran komunikasi strategis. Maka isu strategis adalah optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

11. Perencanaan dan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan retribusi, aset, dan keuangan. KLHS menuntut tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Global menekankan transparansi fiskal, nasional menguatkan sistem keuangan daerah, sementara regional menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas keuangan daerah di Kalbar. Maka isu strategis adalah optimalisasi perencanaan dan tata kelola keuangan daerah.

2.2.2.8 Telaahan Isu/Kesenjangan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, isu gender menjadi penting karena Setda berperan sebagai koordinator kebijakan lintas OPD. Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) yang telah disusun OPD menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu direspons dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Isu/Kesenjangan Gender yang Relevan

1. Akses terhadap Pelayanan Publik

Permasalahan: Layanan publik belum sepenuhnya responsif gender, misalnya dalam layanan administrasi, kepegawaian, maupun informasi.

Implikasi: Setda perlu memastikan setiap kebijakan dan standar layanan publik memasukkan indikator gender agar akses perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lebih adil.

2. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Permasalahan: Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan maupun kelembagaan daerah.



Implikasi: Setda harus mendorong mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

3. Kapasitas Aparatur dalam PUG (Pengarusutamaan Gender)

Permasalahan: Pemahaman aparatur mengenai PUG masih terbatas sehingga belum seluruh kebijakan dan program memiliki perspektif gender.

Implikasi: Perlu adanya pelatihan, sosialisasi, dan monitoring internal agar aparatur Setda memahami pentingnya PUG dan mampu mengintegrasikannya dalam perencanaan.

4. Data Terpilah Gender

Permasalahan: Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas, sehingga menyulitkan dalam analisis kebutuhan gender.

Implikasi: Setda perlu memperkuat sistem data dan informasi terpilah gender sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Penyusunan tujuan dan sasaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengamanatkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus mengacu pada visi, misi, serta arah kebijakan Kepala Daerah.

Secara umum, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah memperhatikan:

1. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan pembangunan daerah;
2. Penyelarasan dengan isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah;
3. Keterkaitan dengan indikator kinerja utama daerah dan perangkat daerah;
4. Keterpaduan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah dirumuskan secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil, sehingga dapat menjadi landasan bagi strategi serta arah kebijakan yang ditetapkan untuk periode 2025–2029.

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:



“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN ”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya. Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

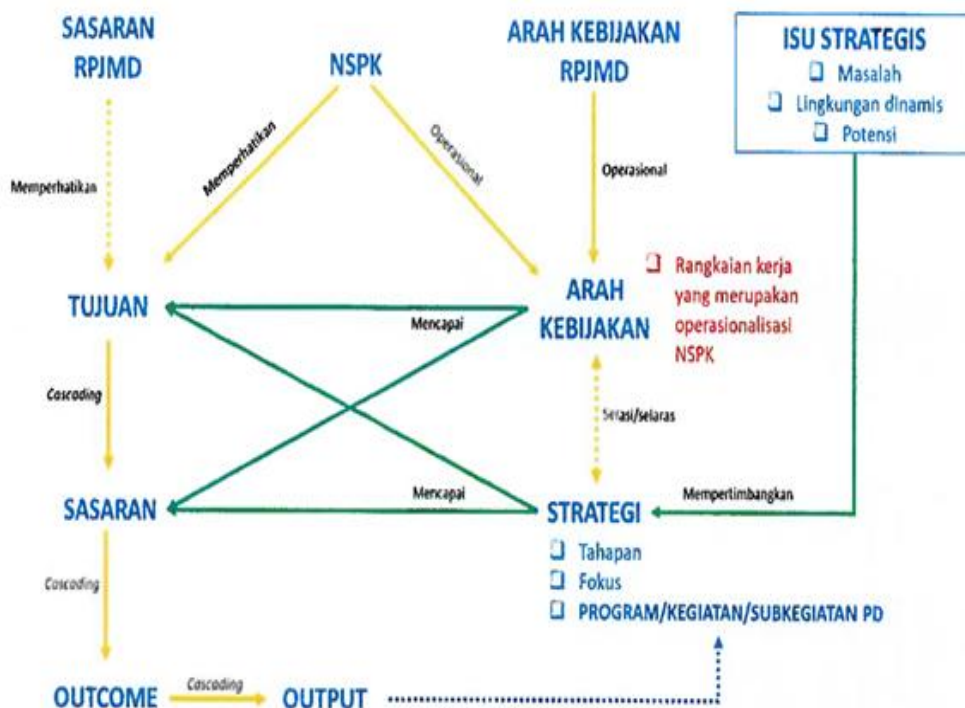
Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah. Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.



Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel** Tujuan ke 2 **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas**, Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dan Sasaran ke 6 **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi** serta Sasaran 7 **Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**, Indikator Sasaran **Indeks Pelayanan Publik** dan **Nilai Sakip** dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Untuk memperjelas keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan/subkegiatan, maka hubungan logis penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1 berikut. Gambar ini menegaskan bahwa rumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah harus selaras dengan sasaran RPJMD dan NSPK, serta memperhatikan isu strategis daerah. Strategi kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada outcome dan output yang terukur.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD





**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi - Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,22	3,22	3,60	3,70	3,80	3,90	4,01	
			Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)	60,78	60,78	64	65	66	68	71	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	70,44	70,44	73,00	74,00	75,50	78,30	81,50	
		Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama	Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD (Angka)	2,60	2,65	2,70	2,75	2,75	2,80	2,85	
			Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan HAM (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR (%)	88%	88%	90%	90%	90%	95%	95%	
			Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik (Angka)	80	80	85	87	90	92	96	
			Persentase penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Efektivitas Pencapaian Target Retribusi (%)	55,66	55,66	55,7	55,8	55,85	55,9	56	
			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Angka)	83,25	83,25	85	86	87	88	89	
			Indeks kualitas kebijakan (Angka)	50	55	60	65	70	79	85	
			Indeks Reformasi Hukum (Angka)	80	80	81	82	83	84	85	
			Persentase Capaian HAM (%)	90	90	90	90	95	95	95	
		Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian	Nilai kepuasan layanan administrasi (skala 1-100) (Kategori)	75	75	80	82	85	88	90	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan (%)	45	45	60	70	80	90	95	
			Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi (%)	40	40	60	70	80	90	100	
			Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	29,75	29,77	29,8	29,85	29,85	29,85	29,9	
			Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi (%)	50	50	65	75	85	95	100	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi,	Indeks Pelayanan Publik	3,22	3,22	3,60	3,70	3,80	3,90	4,01	



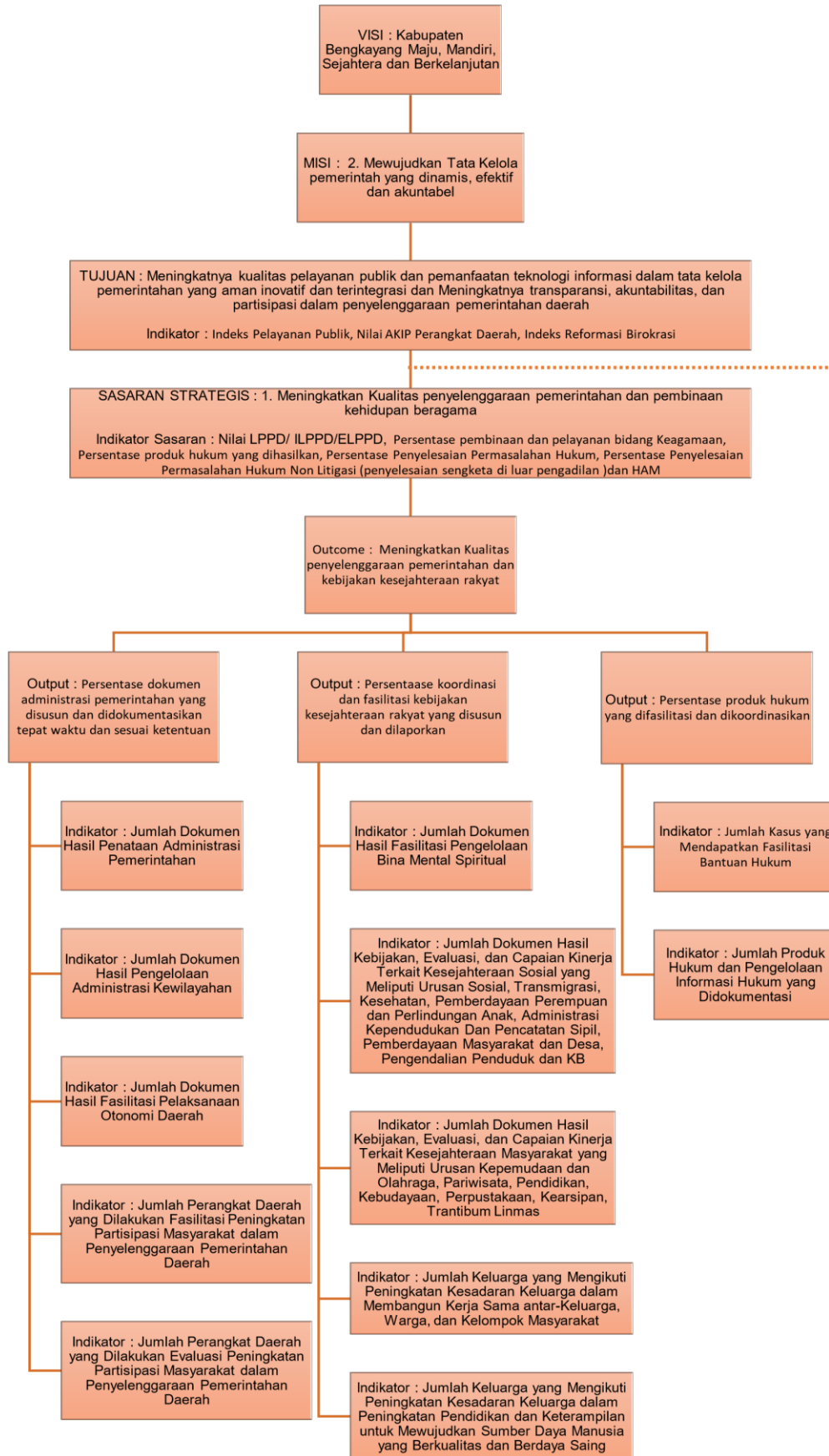
**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

		Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah										
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	60,78	60,78	64,00	65,00	66,00	68,00	71,00		
			Indeks Reformasi Birokrasi	70,44	70,44	73,00	74,00	75,50	78,30	81,50		

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029

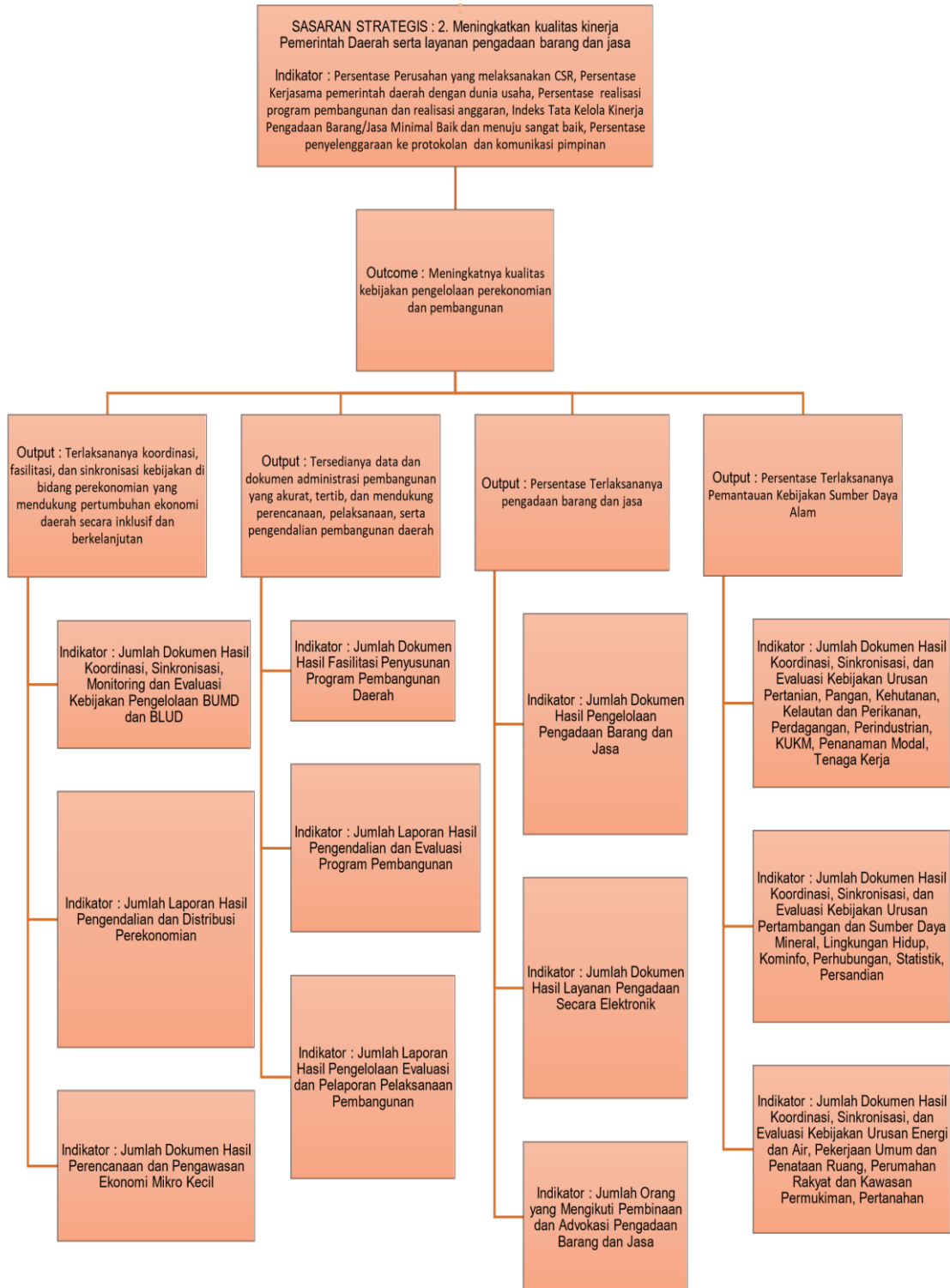


Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029



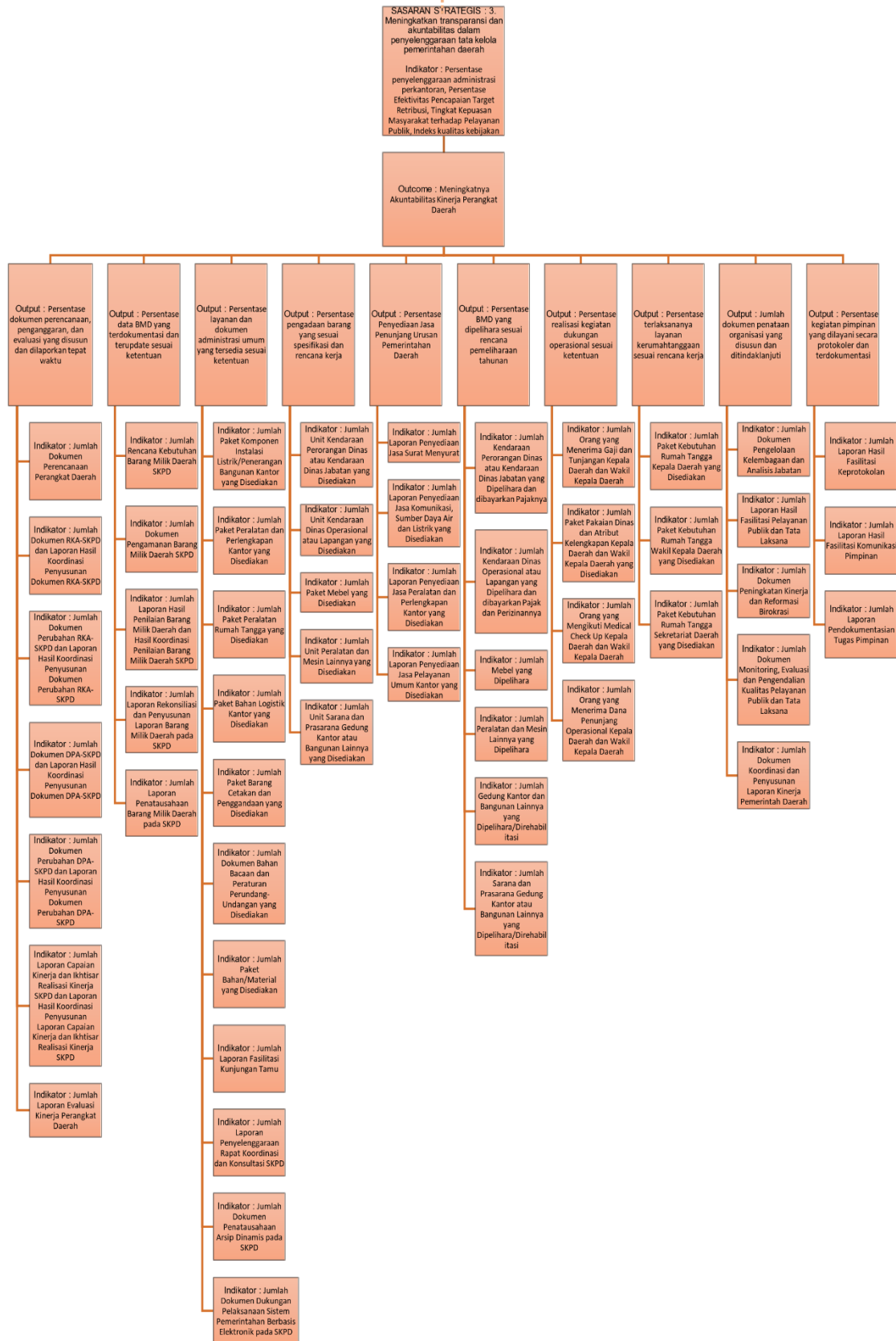


Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029





Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029





**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH							
Kabupaten Bengkulu Tengah Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	Misi 2: Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks Pelayanan Publik.	
						Nilai AKIP Perangkat Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi	
			Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama			Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan	
						Persentase produk hukum yang dihasilkan	
						Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum	
						Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)dan HAM	
				Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Persentase dokumen administrasi pemerintahan yang disusun dan didokumentasikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.01.02.2.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Persentaase koordinasi dan fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang disusun dan dilaporkan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
					Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
			Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa			Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	
						Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	
						Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran	
						Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik	
						Persentase penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
					Tersedianya data dan dokumen administrasi pembangunan yang akurat, tertib, dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
					Persentase Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
					Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah			Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	
						Persentase Efektivitas Pencapaian Target Retribusi	
						Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	
						Indeks kualitas kebijakan	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase data BMD yang terdokumentasi dan terupdate sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Persentase layanan dan dokumen administrasi umum yang tersedia sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Persentase pengadaan barang yang sesuai spesifikasi dan rencana kerja		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Persentase BMD yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Persentase realisasi kegiatan dukungan operasional sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Persentase terlaksananya layanan kerumahtanggaan sesuai rencana kerja		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
				Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun dan ditindaklanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
					Persentase kegiatan pimpinan yang dilayani secara protokoler dan terdokumentasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
			Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian			Nilai kepuasan layanan administrasi (skala 1-100)	
						Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi	
						Indeks Kematangan Organisasi	
						Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					Persentase data BMD yang terdokumentasi dan terupdate sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Persentase dokumen pendapatan daerah yang terdokumentasi dan diverifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4.01.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Persentase layanan dan dokumen administrasi umum yang tersedia sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Persentase pengadaan barang yang sesuai spesifikasi dan rencana kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Persentase BMD yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Persentase realisasi kegiatan dukungan operasional sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Persentase terlaksananya layanan kerumahtanggaan sesuai rencana kerja	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
					Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
					Persentase kegiatan pimpinan yang dilayani secara protokoler dan terdokumentasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan



Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Gambar 3.3 *Cascading* Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029



3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2.1 Perumusan Strategi Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan kebijakan nasional dan daerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan moderasi beragama	Dinamika politik, sosial, dan budaya yang berpotensi memicu konflik dan mengganggu stabilitas pemerintahan
	Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang pelayanan pemerintahan berbasis digital	Penyalahgunaan media sosial yang dapat memicu intoleransi dan disinformasi
	Kerja sama lintas sektor (K/L, Provinsi, OPD, tokoh agama) dalam pembinaan kehidupan beragama	Terbatasnya sumber daya fiskal daerah dalam mendukung program pembinaan kehidupan beragama
	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama	Kesenjangan digital antarwilayah yang menghambat pemerataan pelayanan pemerintahan berbasis TI
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya struktur kelembagaan Sekretariat Daerah yang mendukung koordinasi lintas perangkat daerah	Memanfaatkan struktur kelembagaan dan SDM Sekretariat Daerah untuk mendorong digitalisasi pelayanan pemerintahan	Memperkuat peran koordinasi Sekretariat Daerah dalam mencegah potensi konflik politik, sosial, dan agama
Ketersediaan SDM ASN dengan pengalaman dalam bidang pemerintahan dan pembinaan masyarakat	Mengoptimalkan kerja sama dengan K/L, provinsi, dan tokoh agama dalam memperkuat moderasi beragama	Meningkatkan literasi digital ASN untuk menghadapi penyalahgunaan media sosial.
Dukungan regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Menggunakan dukungan kebijakan nasional/daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.	Menyusun regulasi internal untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal dan kesenjangan digital
Jaringan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama.		
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas ASN di bidang teknologi informasi.	Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan TI untuk mendukung digitalisasi pemerintahan	Menyusun prioritas program/kegiatan agar tetap efektif dengan keterbatasan fiskal
Keterbatasan anggaran daerah untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama.	Menggali sumber pendanaan alternatif (hibah, CSR, kerja sama) untuk mendukung pembinaan kehidupan beragama	Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah untuk mengantisipasi potensi konflik sosial dan keterbatasan sumber daya



Tabel 3.2.2 Perumusan Strategi Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (SPSE, e-Katalog).	Risiko penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
	Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan digitalisasi penuh layanan pengadaan	Perubahan regulasi pengadaan secara cepat yang menuntut adaptasi tinggi
	Potensi kerja sama dengan LKPP, BPKP, dan lembaga pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas	Kesenjangan kompetensi ASN dalam mengoperasikan sistem digital pengadaan
	Tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah yang lebih transparan dan efisien	Keterbatasan fiskal daerah yang dapat menghambat pengadaan strategis
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya unit kerja khusus yang menangani layanan pengadaan barang dan jasa	Mengoptimalkan SDM bersertifikat PBJ untuk memanfaatkan sistem e-procurement	Memperkuat mekanisme pengendalian internal untuk mencegah potensi korupsi
Ketersediaan SDM ASN yang telah bersertifikat pengadaan barang/jasa	Mengintegrasikan sistem pengadaan dengan reformasi birokrasi daerah	Melaksanakan pelatihan adaptif bagi ASN dalam menghadapi perubahan regulasi PBJ
Infrastruktur dasar teknologi informasi yang sudah tersedia di Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan melalui kerja sama dengan LKPP dan lembaga pengawasan	Memanfaatkan TI yang ada untuk mengurangi beban fiskal dengan efisiensi proses.



Dukungan pimpinan daerah terhadap peningkatan transparansi layanan		
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Masih terbatasnya jumlah ASN bersertifikat PBJ	Memperbanyak pelatihan sertifikasi PBJ bagi ASN agar memenuhi kebutuhan SDM	Menyusun SOP standar untuk meminimalisir keterlambatan pengadaan
Sistem informasi pengadaan belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD	Mengajukan dukungan anggaran tambahan atau pendanaan alternatif untuk penguatan layanan pengadaan.	Memprioritaskan pengadaan strategis agar tetap berjalan meski keterbatasan fiskal
Anggaran operasional untuk penguatan layanan PBJ masih terbatas	Mengintegrasikan aplikasi pengadaan dengan sistem keuangan daerah	Mendorong efisiensi belanja melalui mekanisme e-Katalog dan e-purchasing
Proses pengadaan terkadang lamban akibat koordinasi lintas unit kerja yang belum optimal.		

Tabel 3.2.3 Perumusan Strategi Sasaran 3

Sasaran 3: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Adanya regulasi nasional tentang keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas keuangan daerah	Potensi penyalahgunaan informasi publik yang dapat menimbulkan opini negatif.
	Dukungan teknologi informasi yang memungkinkan pengelolaan data dan informasi secara transparan (SPIP, SIPD, e-Gov)	Kurangnya literasi masyarakat terhadap data/informasi resmi pemerintah.
	Peningkatan peran serta masyarakat dan media dalam pengawasan kinerja pemerintah	Ancaman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi.
	Dukungan lembaga pengawas eksternal (BPK, Inspektorat, KPK) dalam memperkuat akuntabilitas daerah	Ketergantungan tinggi pada anggaran daerah yang terbatas dalam mendukung sistem transparansi digital.
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya unit PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan pemerintah daerah	Memanfaatkan PPID dan infrastruktur TI untuk memperkuat layanan keterbukaan informasi publik.	Menggunakan sistem digital (SIPD, SPIP) untuk mencegah potensi praktik KKN
Dukungan regulasi internal untuk keterbukaan informasi publik.	Mengoptimalkan dukungan regulasi nasional/daerah dalam membangun sistem pelaporan kinerja yang transparan	Menguatkan literasi digital ASN untuk menghadapi potensi penyalahgunaan informasi publik
Infrastruktur TI dasar sudah tersedia di Sekretariat Daerah	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawas untuk memperkuat akuntabilitas.	Membuat protokol keamanan data untuk menjaga keandalan informasi pemerintah.
Dukungan pimpinan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih		



Tabel 3.2.4 Perumusan Strategi Sasaran 4

Sasaran 4: Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Dukungan regulasi nasional tentang manajemen ASN (UU ASN, PP Manajemen PNS, dan NSPK BKN)	Perubahan regulasi kepegawaian yang cepat dan dinamis.
	Perkembangan teknologi informasi yang mendukung sistem administrasi kepegawaian digital.	Keterbatasan literasi digital sebagian pegawai.
	Dukungan anggaran daerah untuk pengembangan sistem layanan kepegawaian	Potensi keterlambatan pelayanan akibat birokrasi berlapis.
	Kerja sama dan fasilitasi dari BKN/Provinsi dalam sistem kepegawaian	Risiko penyalahgunaan data/keamanan informasi kepegawaian.
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya unit kerja dan pejabat fungsional/struktural yang menangani kepegawaian	Optimalisasi unit kerja kepegawaian untuk mempercepat implementasi digitalisasi administrasi kepegawaian	Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan layanan administrasi kepegawaian tetap sesuai regulasi.
Pengalaman dalam mengelola administrasi kepegawaian secara rutin	Pemanfaatan pengalaman dan data historis untuk mendukung integrasi dengan sistem BKN/Provinsi.	Penerapan standar pelayanan minimal untuk mencegah keterlambatan birokrasi.
Komitmen pimpinan dalam peningkatan layanan kepegawaian	Dukungan pimpinan digunakan untuk memastikan anggaran penguatan sistem informasi kepegawaian.	Komitmen pimpinan diarahkan untuk meningkatkan literasi digital pegawai.
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian.	Percepatan pengembangan dan adopsi aplikasi layanan kepegawaian berbasis digital.	Peningkatan pelatihan literasi digital untuk mengurangi risiko keterlambatan layanan.



Keterbatasan jumlah SDM yang menguasai administrasi kepegawaian berbasis digital.	Mendorong kerja sama dengan BKN/Provinsi untuk peningkatan kapasitas SDM kepegawaian.	Penataan distribusi tugas agar layanan tetap berjalan meski SDM terbatas.
Masih adanya tumpang tindih prosedur administrasi.	enyederhanaan SOP dengan memanfaatkan dukungan regulasi nasional dan daerah.	Penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah kesalahan administrasi.

Tabel 3.2.5 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan pemerintahan 2. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah 3. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan kerukunan umat 	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, serta mendukung terciptanya kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.
2	Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerapan e-government dan e-procurement 2. Peningkatan kompetensi ASN dalam pengadaan barang/jasa 3. Penguatan pengawasan internal atas kinerja perangkat daerah 	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui penguatan kinerja dan layanan pengadaan barang/jasa yang transparan serta kompetitif.
3	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan 2. Penerapan standar pelayanan publik 	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pelaporan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik



4	Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi administrasi kepegawaian 2. Peningkatan kompetensi dan kedisiplinan ASN 3. Penguatan sistem pengendalian internal administrasi 	Mewujudkan layanan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung manajemen ASN yang profesional.
----------	---	--	--

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan strategi dalam jangka menengah yang lebih operasional, bersifat fokus, dan berorientasi hasil. Penyusunan arah kebijakan perangkat daerah harus sesuai dengan pentahapan pembangunan pada RPJMD, memperhatikan lokus prioritas pembangunan, serta menggunakan teknik perumusan sebagaimana diatur dalam Tabel 3.5 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 dirumuskan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan, serta menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan yang dihadapi. Selain itu, arah kebijakan juga mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres No. 95/2018	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, inovatif, dan terintegrasi	Sesuai SIPD
2	Penerapan Reformasi Birokrasi sesuai PermenPAN-RB No. 25/2020	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Peningkatan efektivitas koordinasi, pengendalian, dan akuntabilitas	Cascading RB



			penyelenggaraan pemerintahan	
3	Pengarusutamaan Gender (Inpres No. 9/2000 dan Permendagri No. 67/2011)	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Integrasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan pelayanan Setda melalui Rencana Aksi Daerah PUG	GAP
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai PP No. 2/2018 dan Permendagri No. 59/2021	Pemenuhan SPM urusan wajib pelayanan dasar	Fasilitasi koordinasi pencapaian SPM, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM lintas perangkat daerah	Untuk OPD Pengampu
5	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 77/2020	Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah secara transparan, efektif, dan akuntabel	-
6	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004, Permendagri No. 86/2017, Inmendagri No. 2/2025)	Penguatan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Integrasi perencanaan berbasis data dan evidence-based policy melalui Satu Data Daerah dan penguatan sistem monitoring & evaluasi pembangunan	-
7	Kelembagaan Daerah sesuai UU No. 23/2014 jo. PP No. 18/2016	Penataan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan proporsional	Penataan organisasi, tata laksana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah	-



Tabel 3.3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi awal pelaksanaan Renstra, penataan organisasi, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan dasar pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, perbaikan sistem pengadaan barang/jasa, serta penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.	Optimalisasi tata kelola pemerintahan terintegrasi, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, serta peningkatan indeks pelayanan publik.	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, akselerasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta konsolidasi capaian akuntabilitas kinerja.	Evaluasi menyeluruh capaian Renstra, keberlanjutan tata kelola inovatif, dan perumusan rekomendasi strategis untuk perencanaan periode selanjutnya.

3.4. Penyajian Lokus Renstra

Penyajian lokus Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup dan fokus strategis yang menjadi titik perhatian dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran Renstra. Lokus Renstra menegaskan keterkaitan antara dokumen Renstra PD dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, serta keterpaduan dengan dokumen spasial (RTRW) dan aspaspial (KLHS, Renstra K/L, Renstra Provinsi).

Dimensi Lokus	Fokus Utama	Keterkaitan dengan RPJMD 2025–2029
Tata Kelola Pemerintahan	Koordinasi, sinkronisasi kebijakan, reformasi birokrasi, SPBE	Misi 2 RPJMD: Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif
Pelayanan Administrasi	Layanan umum, keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, komunikasi pimpinan	Misi 1 RPJMD: Pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah diakses
Perencanaan, Monitoring & Evaluasi	Penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, SAKIP	Misi 4 RPJMD: Perencanaan pembangunan berbasis data dan akuntabel



Manajemen ASN & Kelembagaan	Penataan organisasi, manajemen ASN berbasis merit, pengembangan SDM	Tujuan RPJMD: Reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN
Kerja Sama Daerah & Hubungan Antar Lembaga	Kerja sama lintas PD, antar daerah, pusat, swasta, BUMD, LSM	Misi 3 RPJMD: Sinergi pembangunan daerah berbasis kolaborasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, Sekretariat Daerah menetapkan beberapa lokus strategis. Lokus ini merupakan ruang lingkup fokus utama yang menjadi titik perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi jembatan antara Renstra Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan RPJMD.

1. Lokus Tata Kelola Pemerintahan

Fokus utama dari lokus ini adalah koordinasi, sinkronisasi kebijakan, reformasi birokrasi, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sekretariat Daerah memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan selaras antar perangkat daerah, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Misi 2 RPJMD, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif.

2. Lokus Pelayanan Administrasi

Fokus diarahkan pada penyelenggaraan layanan administrasi umum, administrasi keuangan, kerumahtanggaan, layanan keprotokolan, serta komunikasi pimpinan. Sekretariat Daerah dituntut memberikan dukungan administrasi yang berkualitas, cepat, dan mudah diakses, baik bagi pimpinan daerah maupun masyarakat. Lokus ini berkontribusi terhadap Misi 1 RPJMD, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

3. Lokus Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

Menekankan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan, serta evaluasi kinerja yang terukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya lokus ini, Sekretariat Daerah mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berbasis data, terintegrasi, dan akuntabel, sesuai dengan Misi 4 RPJMD, yaitu penguatan perencanaan pembangunan berbasis data dan akuntabilitas kinerja.



4. Lokus Manajemen ASN dan Kelembagaan
Fokus utamanya adalah penataan organisasi perangkat daerah, penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit, serta pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Dengan memperkuat aspek kelembagaan dan profesionalisme ASN, Sekretariat Daerah mendukung Tujuan RPJMD terkait dengan reformasi birokrasi serta penguatan kapasitas aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
5. Lokus Kerja Sama Daerah dan Hubungan Antar Lembaga
Lokus ini berfokus pada pengembangan kerja sama lintas perangkat daerah, antar daerah, dengan pemerintah pusat, serta dengan pihak ketiga seperti BUMD, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Selain itu, Sekretariat Daerah juga berperan dalam fasilitasi kerja sama pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi salah satu isu penting bagi Kabupaten Bengkayang. Lokus ini sejalan dengan Misi 3 RPJMD, yaitu memperkuat sinergi pembangunan daerah berbasis kolaborasi.

3.5. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029.

Manajemen risiko ini memuat:

- a. Risiko dalam mengimplementasikan Renstra PD
Beberapa risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan Renstra antara lain: keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, rendahnya konsistensi koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan anggaran, kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG), serta belum optimalnya dukungan fasilitasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Potensi sebab terjadinya risiko yang dihadapi
Risiko tersebut muncul karena adanya keterbatasan kompetensi ASN, tingginya rotasi pegawai, kurangnya koordinasi lintas sektor, ketergantungan pada fiskal daerah, budaya kerja yang belum digital, serta minimnya pemahaman dan ketersediaan data pendukung untuk PUG maupun SPM.
- c. Dampak dari sebab risiko yang dihadapi
Apabila risiko tersebut tidak dikendalikan, dampaknya antara lain: terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran strategis, menurunnya kualitas pelayanan publik, berkurangnya tingkat kepuasan masyarakat,



serta potensi tidak tercapainya target kinerja RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029.

d. Rencana pengendalian risiko

Untuk mengurangi potensi risiko dan dampaknya, Sekretariat Daerah menetapkan langkah-langkah pengendalian antara lain: penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi forum koordinasi dan monitoring lintas perangkat daerah, penyusunan skema efisiensi anggaran, percepatan implementasi SPBE, penerapan perencanaan responsif gender, serta fasilitasi pencapaian SPM bagi perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Pendahuluan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 merupakan hasil penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Penyusunan rencana ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029.

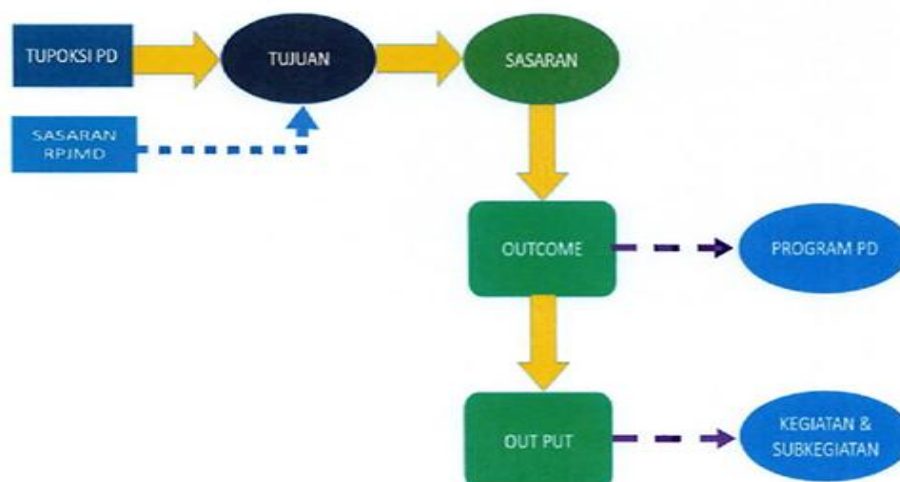
Dalam penyusunannya, program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga mempertimbangkan kesinambungan perencanaan jangka menengah hingga tahun 2030, sehingga program tahun 2025–2029 menjadi pijakan penting dalam penyusunan Renja PD tahun 2030.

Tujuan yang hendak dicapai melalui Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah:

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dilengkapi indikator kinerja, target tahunan, dan kebutuhan pendanaan lima tahunan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD





4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada Bab III. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan hasil analisis isu strategis, tujuan dan sasaran RPJMD, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan rencana program ini dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan secara lebih terstruktur dan terukur, sehingga dapat menjamin keterpaduan antara dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja, hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran.

Dalam periode Renstra 2025–2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan:

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran dan program prioritas, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan indikatif lima tahunan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfungsi untuk memberikan dukungan administratif, pelayanan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui program ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memastikan kelancaran operasional perangkat daerah, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, maupun komunikasi pimpinan.

Program ini juga mencakup fasilitasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penataan organisasi, serta penyediaan dukungan teknis dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan yang efektif. Dengan adanya program ini, Sekretariat Daerah mampu menyediakan fondasi administratif yang solid sehingga perangkat daerah dapat



menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD:
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD:
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD:
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD:
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:
 - Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material
- d. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan: Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- g. **Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- h. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- i. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

k. **Kegiatan Penataan Organisasi**

- Sub Kegiatan: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

l. **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

- Sub Kegiatan: Fasilitasi Keprotokolan
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Sub Kegiatan: Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini berfungsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui perumusan kebijakan yang terkoordinasi dan responsif. Peran Sekretariat Daerah dalam program ini terutama pada aspek koordinasi administrasi pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan administrasi kewilayahan, serta penguatan kebijakan hukum dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, program ini juga mencakup fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG), pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan, serta penyediaan dukungan hukum bagi perangkat daerah. Dengan adanya program ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang berperan strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

a. **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**

- Sub Kegiatan: Penataan Administrasi Pemerintahan
- Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

c. **Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

- Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Hukum



- Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini berfungsi untuk mendukung penguatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur daerah. Meskipun pelaksanaan teknis berada pada perangkat daerah sektoral (seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, dan lain-lain), Sekretariat Daerah berperan strategis dalam memastikan keterpaduan arah kebijakan lintas sektor, fasilitasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan daerah.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
 - Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Sub Kegiatan: Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Sub Kegiatan: Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**
 - Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- c. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**
 - Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - Sub Kegiatan: Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Sub Kegiatan: Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- d. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**
 - Sub Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sub Kegiatan: Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Sub Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa



**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH									
- Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				
					Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)				
					Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)				
		Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama					Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD (Angka)		
							Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan (%)		
							Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum (%)		
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)dan HAM (%)		
			Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat		Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)dan HAM (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase dokumen administrasi pemerintahan yang disusun dan didokumentasikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang disusun dan dilaporkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa			Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR (%)		
					Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha (%)		
					Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran (%)		
					Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik (Angka)		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik (Angka)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Tersedianya data dan dokumen administrasi pembangunan yang akurat, tertib, dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Persentase Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah			Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran (%)		
					Persentase Efektivitas Pencapaian Target Retribusi (%)		
					Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Angka)		
					Indeks kualitas kebijakan (Angka)		
					Indeks Reformasi Hukum (Angka)		
					Persentase Capaian HAM (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase efektivitas pencapaian target retribusi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase data BMD yang terdokumentasi dan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				terupdate sesuai ketentuan			
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase dokumen pendapatan daerah yang terdokumentasi dan diverifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Persentase layanan dan dokumen administrasi umum yang tersedia sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase pengadaan barang yang sesuai spesifikasi dan rencana kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase BMD yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase realisasi kegiatan dukungan operasional sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase terlaksananya layanan kerumahtanggaan sesuai rencana kerja	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Persentase kegiatan pimpinan yang dilayani secara protokoler dan terdokumentasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)		4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat		Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)dan HAM (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase dokumen administrasi pemerintahan yang disusun dan didokumentasikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang disusun dan dilaporkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
				Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik (Angka)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Tersedianya data dan dokumen administrasi pembangunan yang akurat, tertib, dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Persentase Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
		Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian			Nilai kepuasan layanan administrasi (skala 1-100) (Kategori)		
					Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan (%)		
					Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi (%)		
					Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)		
					Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase efektivitas pencapaian target retribusi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase data BMD yang terdokumentasi dan terupdate sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase dokumen pendapatan daerah yang terdokumentasi dan diverifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				terupdate tepat waktu			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Persentase layanan dan dokumen administrasi umum yang tersedia sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase pengadaan barang yang sesuai spesifikasi dan rencana kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase BMD yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase realisasi kegiatan dukungan operasional sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Persentase terlaksananya layanan kerumahtanggaan sesuai rencana kerja	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
					Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Persentase kegiatan pimpinan yang dilayani secara protokoler dan terdokumentasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029



4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pendanaan

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan rencana operasional berupa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan pendanaan indikatif.

Rencana ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah, Renja tahunan, hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Daftar lengkap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target lima tahunan, serta pendanaan indikatif sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.3 berikut:



**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				47.765.903.136		41.713.548.369		44.551.740.151		46.002.956.812		49.507.259.344		53.146.696.741		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31.916.451.367		28.472.290.259		30.038.266.223		31.239.796.872		34.489.388.747		37.868.964.296		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100		100	28.472.290.259	100	30.038.266.223	100	31.239.796.872	100	34.489.388.747	100	37.868.964.296	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	
	Persentase penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan (%)	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase efektivitas pencapaian target retribusi (%)	55.66	55.70		55.70		55.80		55.85		55.90		56			
	Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi (%)	40	60		60		70		80		90		100			
	Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi (%)	50	65		65		75		85		95		100			
	Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan (%)	45	60		60		70		80		90		95			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.595.000		41.126.879		76.784.924		66.746.065		92.529.211		113.606.056		
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2	41.126.879	2	76.784.924	2	66.746.065	2	92.529.211	2	113.606.056		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				33.365.000		13.640.822		20.940.733		18.202.940		25.234.501		30.982.561		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	33.365.000	7	13.640.822	7	20.940.733	7	18.202.940	7	25.234.501	7	30.982.561		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11.000.000		4.497.198		7.423.997		6.453.384		8.946.244		10.984.072		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.000.000	1	4.497.198	1	7.423.997	1	6.453.384	1	8.946.244	1	10.984.072		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.500.000		3.883.944		10.478.923		9.108.909		12.627.564		15.503.945		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	9.500.000	2	3.883.944	2	10.478.923	2	9.108.909	2	12.627.564	2	15.503.945		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				11.000.000		4.497.198		7.590.687		6.598.281		9.147.112		11.230.695		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.000.000	1	4.497.198	1	7.590.687	1	6.598.281	1	9.147.112	1	11.230.695		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				11.000.000		4.497.198		7.815.493		6.793.696		9.418.013		11.563.303		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	11.000.000	2	4.497.198	2	7.815.493	2	6.793.696	2	9.418.013	2	11.563.303		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.000.000		4.497.198		9.167.481		7.968.925		11.047.218		13.563.619		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	11.000.000	2	4.497.198	2	9.167.481	2	7.968.925	2	11.047.218	2	13.563.619		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.730.000		5.613.321		13.367.610		11.619.930		16.108.559		19.777.861		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	13.730.000	1	5.613.321	1	13.367.610	1	11.619.930	1	16.108.559	1	19.777.861		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.834.020.730		21.673.253.691		22.724.616.413		23.709.575.666		24.736.634.666		25.758.754.478		
Persentase kelengkapan dokumen administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10	10		10	21.673.253.691	10	22.724.616.413	10	23.709.575.666	10	24.736.634.666	10	25.758.754.478		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	241	241		241		241		241		241		241			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200	200		200		200		200		200		200			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.751.525.730		21.639.526.747		22.639.526.744		23.639.526.744		24.639.526.744		25.639.526.744		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	241	241	15.751.525.730	241	21.639.526.747	241	22.639.526.744	241	23.639.526.744	241	24.639.526.744	241	25.639.526.744		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42.400.000		17.334.656		47.164.616		40.998.316		56.835.439		69.781.749		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200	200	42.400.000	200	17.334.656	200	47.164.616	200	40.998.316	200	56.835.439	200	69.781.749		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.332.000		4.224.096		9.940.561		8.640.932		11.978.813		14.707.418		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.332.000	1	4.224.096	1	9.940.561	1	8.640.932	1	11.978.813	1	14.707.418		
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				11.000.000		4.497.198		9.321.557		7.319.631		10.147.111		12.458.479		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10	10	11.000.000	10	4.497.198	10	9.321.557	10	7.319.631	10	10.147.111	10	12.458.479		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.704.000		4.785.019		9.442.744		6.641.750		9.207.373		11.304.682		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	11.704.000	12	4.785.019	12	9.442.744	12	6.641.750	12	9.207.373	12	11.304.682		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				7.059.000		2.885.975		9.220.191		6.448.293		8.939.186		10.975.406		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	7.059.000	2	2.885.975	2	9.220.191	2	6.448.293	2	8.939.186	2	10.975.406		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				364.473.850		136.745.023		179.510.807		235.460.611		337.273.767		544.077.149		
Persentase data BMD yang terdokumentasi dan terupdate sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		2	136.745.023	2	179.510.807	2	235.460.611	2	337.273.767	2	544.077.149		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		5			
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				11.000.000		4.497.198		13.730.724		7.627.831		10.574.363		12.983.054		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	5	11.000.000	5	4.497.198	5	13.730.724	5	7.627.831	5	10.574.363	5	12.983.054		
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				191.878.850		66.181.937		94.607.650		90.070.902		135.721.884		179.968.405		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	191.878.850	1	66.181.937	1	94.607.650	1	90.070.902	1	135.721.884	1	179.968.405		
4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				11.000.000		4.497.198		11.478.160		27.600.074		38.261.628		113.632.051		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	11.000.000	2	4.497.198	2	11.478.160	2	27.600.074	2	38.261.628	2	113.632.051		
4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11.000.000		4.497.198		11.478.160		29.088.202		40.324.600		99.501.198		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	11.000.000	5	4.497.198	5	11.478.160	5	29.088.202	5	40.324.600	5	99.501.198		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				139.595.000		57.071.492		48.216.113		81.073.602		112.391.292		137.992.441		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	139.595.000	5	57.071.492	5	48.216.113	5	81.073.602	5	112.391.292	5	137.992.441		
4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		12.265.086		18.020.504		11.356.766		15.743.738		19.329.940		
Persentase dokumen pendapatan daerah yang terdokumentasi dan diverifikasi tepat waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)				1	12.265.086	1	18.020.504	1	11.356.766	1	15.743.738	1	19.329.940		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)				2		2		2		2		2			
4.01.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		6.132.543		9.010.252		5.874.189		8.143.313		9.998.245		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)			0	2	6.132.543	2	9.010.252	2	5.874.189	2	8.143.313	2	9.998.245		
4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		6.132.543		9.010.252		5.482.577		7.600.425		9.331.695		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)			0	1	6.132.543	1	9.010.252	1	5.482.577	1	7.600.425	1	9.331.695		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				196.740.000		80.434.438		172.168.352		155.533.259		223.757.070		284.724.014		
Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang terdokumentasi dan terupdate tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25		25	55.904.265	25	77.163.350	25	29.871.819	25	44.125.356	25	57.509.237		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000		16.353.449		67.576.893		97.903.154		135.721.884		166.637.412		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000	1	16.353.449	1	67.576.893	1	97.903.154	1	135.721.884	1	166.637.412		
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		4.088.362		19.683.347		19.068.010		29.148.175		39.120.465		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	4.088.362	1	19.683.347	1	19.068.010	1	29.148.175	1	39.120.465		
4.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.000		4.088.362		7.744.762		8.690.276		14.761.655		21.456.900		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	4.088.362	1	7.744.762	1	8.690.276	1	14.761.655	1	21.456.900		
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				136.740.000		55.904.265		77.163.350		29.871.819		44.125.356		57.509.237		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25	136.740.000	25	55.904.265	25	77.163.350	25	29.871.819	25	44.125.356	25	57.509.237		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.500.511.576		1.444.127.935		1.594.814.886		1.484.681.942		2.105.497.286		2.713.657.256		
Persentase layanan dan dokumen administrasi umum yang tersedia sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1	1.444.127.935	1	1.594.814.886	1	1.484.681.942	1	2.105.497.286	1	2.713.657.256		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	150		150		150		150		150		150			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		40.883.622		66.643.430		59.888.534		85.737.143		108.599.601		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	40.883.622	1	66.643.430	1	59.888.534	1	85.737.143	1	108.599.601		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				274.881.510		112.381.517		53.314.564		48.302.283		69.675.272		88.879.063		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	274.881.510	1	112.381.517	1	53.314.564	1	48.302.283	1	69.675.272	1	88.879.063		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		40.883.622		112.628.154		103.777.343		152.008.510		196.632.146		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	40.883.622	1	112.628.154	1	103.777.343	1	152.008.510	1	196.632.146		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				272.578.866		111.440.113		123.608.273		156.399.309		230.386.540		299.529.081		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	272.578.866	1	111.440.113	1	123.608.273	1	156.399.309	1	230.386.540	1	299.529.081		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000		20.441.811		34.743.533		32.159.228		47.296.362		61.402.553		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	20.441.811	1	34.743.533	1	32.159.228	1	47.296.362	1	61.402.553		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.000.000		8.176.724		4.406.013		3.829.971		5.309.440		6.518.856		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	8.176.724	1	4.406.013	1	3.829.971	1	5.309.440	1	6.518.856		
4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				144.221.100		58.962.809		90.102.523		86.154.775		141.150.759		199.964.894		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	144.221.100	1	58.962.809	1	90.102.523	1	86.154.775	1	141.150.759	1	199.964.894		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				760.820.000		311.050.772		253.327.749		229.998.005		332.415.467		424.798.756		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	760.820.000	1	311.050.772	1	253.327.749	1	229.998.005	1	332.415.467	1	424.798.756		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.545.789.000		703.929.358		811.675.066		721.691.141		977.197.563		1.241.695.341		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	150	1.545.789.000	150	703.929.358	150	811.675.066	150	721.691.141	150	977.197.563	150	1.241.695.341		
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		4.088.362		6.973.034		8.019.443		13.831.689		20.315.100		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	4.088.362	1	6.973.034	1	8.019.443	1	13.831.689	1	20.315.100		
4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				78.000.000		31.889.225		37.392.547		34.461.910		50.488.541		65.321.865		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	78.000.000	1	31.889.225	1	37.392.547	1	34.461.910	1	50.488.541	1	65.321.865		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.227.990.000		502.046.788		923.550.864		1.292.321.633		1.574.373.851		2.066.303.906		
Persentase pengadaan barang yang sesuai spesifikasi dan rencana kerja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		2	502.046.788	0	923.550.864	0	1.292.321.633	0	1.574.373.851	0	2.066.303.906		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	40		40	45	50	55	60							
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0	1	1	1	1							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5	7	7	8	8							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	20		20	13	14	12	12							
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						388.394.408		0		0		0		0		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		2	388.394.408	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				950.000.000		0		405.461.355		352.451.354		542.887.535		666.549.647		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	950.000.000	0	0	1	405.461.355	1	352.451.354	1	542.887.535	1	666.549.647		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.000.000		16.353.449		225.256.308		215.386.939		325.732.521		533.239.718		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	40	40.000.000	40	16.353.449	45	225.256.308	50	215.386.939	55	325.732.521	60	533.239.718		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				119.590.000		48.892.723		157.679.416		137.064.416		217.155.014		266.619.859		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	119.590.000	5	48.892.723	7	157.679.416	7	137.064.416	8	217.155.014	8	266.619.859		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				118.400.000		48.406.208		135.153.785		587.418.924		488.598.781		599.894.682		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	20	118.400.000	20	48.406.208	13	135.153.785	14	587.418.924	12	488.598.781	12	599.894.682		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.553.634.843		1.248.436.522		1.140.977.972		996.240.975		1.457.080.312		1.815.644.611		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1	1.248.436.522	1	1.140.977.972	1	996.240.975	1	1.457.080.312	1	1.815.644.611		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	15		15		19		19		19		20			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		2.861.854		5.839.545		7.034.146		12.465.784		18.638.061		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	1.000	7.000.000	1.000	2.861.854	1.000	5.839.545	1.000	7.034.146	1.000	12.465.784	1.000	18.638.061		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.403.451.742		573.781.903		627.931.169		468.031.241		665.112.319		836.612.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	1.403.451.742	12	573.781.903	12	627.931.169	12	468.031.241	12	665.112.319	12	836.612.000		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				703.075.936		287.442.907		135.153.785		195.806.308		325.732.521		399.929.788		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	15	703.075.936	15	287.442.907	19	135.153.785	19	195.806.308	19	325.732.521	20	399.929.788		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.440.107.165		384.349.858		372.053.473		325.369.280		453.769.688		560.464.762		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.440.107.165	1	384.349.858	1	372.053.473	1	325.369.280	1	453.769.688	1	560.464.762		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.696.866.150		857.274.828		684.779.177		732.315.592		1.042.344.065		1.313.102.804		
Persentase BMD yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1	857.274.828	1	684.779.177	1	732.315.592	1	1.042.344.065	1	1.313.102.804		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	45		45		45		48		48		48			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	55	55		55		55		55		55		55			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	100		100		100		100		100		100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		1			



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	300		300		300		300		300		300			
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.060.461.250		433.554.967		225.256.308		195.806.308		271.443.767		333.274.823		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	55	55	1.060.461.250	55	433.554.967	55	225.256.308	55	195.806.308	55	271.443.767	55	333.274.823		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.000.000		49.060.346		54.061.514		46.993.514		65.146.504		79.985.958		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	45	120.000.000	45	49.060.346	45	54.061.514	48	46.993.514	48	65.146.504	48	79.985.958		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.100.000		22.526.876		45.051.262		39.161.262		54.288.753		66.654.965		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	100	5.100.000	100	22.526.876	100	45.051.262	100	39.161.262	100	54.288.753	100	66.654.965		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				496.500.000		202.987.183		180.205.047		274.128.831		380.021.274		466.584.753		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	300	496.500.000	300	202.987.183	300	180.205.047	300	274.128.831	300	380.021.274	300	466.584.753		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						81.767.244		90.102.523		78.322.523		108.577.507		133.309.929		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1	81.767.244	1	90.102.523	1	78.322.523	1	108.577.507	1	133.309.929		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.804.900		67.378.212		90.102.523		97.903.154		162.866.260		233.292.376		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	14.804.900	1	67.378.212	1	90.102.523	1	97.903.154	1	162.866.260	1	233.292.376		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				896.220.778		720.221.625		720.221.625		720.221.625		720.221.625		720.221.625		
Persentase realisasi kegiatan dukungan operasional sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24	24		24	720.221.625	24	720.221.625	24	720.221.625	24	720.221.625	24	720.221.625		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	28	28		28		28		28		28		28			
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				350.020.778		174.021.625		174.021.625		174.021.625		174.021.625		174.021.625		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	28	28	350.020.778	28	174.021.625	28	174.021.625	28	174.021.625	28	174.021.625	28	174.021.625		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				115.200.000		115.200.000		115.200.000		115.200.000		115.200.000		115.200.000		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	5	115.200.000	5	115.200.000	5	115.200.000	5	115.200.000	5	115.200.000	5	115.200.000		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	31.000.000	2	31.000.000	2	31.000.000	2	31.000.000	2	31.000.000	2	31.000.000		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.268.200.000		1.111.541.598		1.105.590.705		1.092.204.149		1.126.585.307		1.154.690.738		
Persentase terlaksananya layanan kerumahtanggaan sesuai rencana kerja	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1	1.111.541.598	1	1.105.590.705	1	1.092.204.149	1	1.126.585.307	1	1.154.690.738		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				561.600.000		561.600.000		561.600.000		561.600.000		561.600.000		561.600.000		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	561.600.000	1	561.600.000	1	561.600.000	1	561.600.000	1	561.600.000	1	561.600.000		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				441.600.000		441.600.000		441.600.000		441.600.000		441.600.000		441.600.000		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	441.600.000	1	441.600.000	1	441.600.000	1	441.600.000	1	441.600.000	1	441.600.000		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				265.000.000		108.341.598		102.390.705		89.004.149		123.385.307		151.490.738		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	265.000.000	1	108.341.598	1	102.390.705	1	89.004.149	1	123.385.307	1	151.490.738		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				508.295.240		371.343.991		426.922.425		371.106.604		514.460.315		631.647.108		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	43	43		43	371.343.991	43	426.922.425	43	371.106.604	43	514.460.315	43	631.647.108		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1344 orang/bulan	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	20	20		20		20		20		20		20			
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				157.289.160		64.305.505		104.415.760		90.764.448		125.825.587		154.486.878		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	43	43	157.289.160	43	64.305.505	43	104.415.760	43	90.764.448	43	125.825.587	43	154.486.878		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				99.557.600		81.586.375		83.712.002		72.767.498		100.876.647		123.854.923		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	20	20	99.557.600	20	81.586.375	20	83.712.002	20	72.767.498	20	100.876.647	20	123.854.923		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				108.505.240		85.244.494		86.026.285		74.779.212		103.665.461		127.278.988		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	3	3	108.505.240	3	85.244.494	3	86.026.285	3	74.779.212	3	103.665.461	3	127.278.988		
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				53.991.600		62.957.343		74.455.770		64.721.425		89.722.480		110.159.994		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1344 orang/bulan	1	53.991.600	1	62.957.343	1	74.455.770	1	64.721.425	1	89.722.480	1	110.159.994		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				88.951.640		77.250.274		78.312.608		68.074.021		94.370.140		115.866.325		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	12	12	88.951.640	12	77.250.274	12	78.312.608	12	68.074.021	12	94.370.140	12	115.866.325		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				768.903.200		273.471.855		270.307.569		372.031.985		542.887.534		733.204.611		
Persentase kegiatan pimpinan yang dilayani secara protokoler dan terdokumentasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	20	20		20	273.471.855	20	270.307.569	20	372.031.985	20	542.887.534	20	733.204.611		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	20	20		20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	20	20		20		20		20		20		20			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				185.187.600		75.711.398		90.102.523		97.903.154		162.866.260		233.292.376		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	20	20	185.187.600	20	75.711.398	20	90.102.523	20	97.903.154	20	162.866.260	20	233.292.376		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				222.065.600		90.788.460		90.102.523		78.322.523		108.577.507		166.637.412		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	20	20	222.065.600	20	90.788.460	20	90.102.523	20	78.322.523	20	108.577.507	20	166.637.412		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				361.650.000		106.971.997		90.102.523		195.806.308		271.443.767		333.274.823		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	20	20	361.650.000	20	106.971.997	20	90.102.523	20	195.806.308	20	271.443.767	20	333.274.823		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				14.785.884.902		12.725.113.297		13.234.117.828		13.432.629.596		13.634.119.040		13.838.630.825		
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan (%)	100	100		100	12.725.113.297	100	13.234.117.828	100	13.432.629.596	100	13.634.119.040	100	13.838.630.825	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	
	Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)	100	100		100		100		100		100		100			



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum (%)	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)dan HAM (%)	100	100		100		100		100		100		100			
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1.894.451.630		1.630.413.855		763.577.603		769.723.581		781.269.434		792.988.477		
Persentase dokumen administrasi pemerintahan yang disusun dan didokumentasikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4	4		4	1.630.413.855	4	763.577.603	4	769.723.581	4	781.269.434	4	792.988.477		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)				45		45		45		45		45			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)				45		45		45		45		45			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7		7			
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				908.271.030		609.556.285		290.719.953		293.059.934		297.455.831		301.917.671		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4	4	908.271.030	4	609.556.285	4	290.719.953	4	293.059.934	4	297.455.831	4	301.917.671		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				544.962.600		469.008.847		106.587.987		107.445.906		109.057.595		110.693.459		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1	544.962.600	1	469.008.847	1	106.587.987	1	107.445.906	1	109.057.595	1	110.693.459		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				441.218.000		379.723.573		244.593.879		246.562.597		250.261.036		254.014.951		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	7	7	441.218.000	7	379.723.573	7	244.593.879	7	246.562.597	7	250.261.036	7	254.014.951		
4.01.02.2.01.0004 - Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						86.062.575		60.837.892		61.327.572		62.247.486		63.181.198		
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)				45	86.062.575	45	60.837.892	45	61.327.572	45	62.247.486	45	63.181.198		
4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						86.062.575		60.837.892		61.327.572		62.247.486		63.181.198		
Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)				45	86.062.575	45	60.837.892	45	61.327.572	45	62.247.486	45	63.181.198		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				12.196.162.772		10.496.331.745		11.983.837.086		12.080.294.081		12.261.498.493		12.445.420.970		
Persentase koordinasi dan fasilitas kebijakan kesejahteraan rakyat yang disusun dan dilaporkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	500	500		500	10.496.331.745	500	11.983.837.086	500	12.080.294.081	500	12.261.498.493	500	12.445.420.970		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	10	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500	500		500		500		500		500		500			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				11.985.022.772		10.142.494.073		11.648.773.002		11.742.533.092		11.918.671.088		12.097.451.154		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	10	10	11.985.022.772	10	10.142.494.073	10	11.648.773.002	10	11.742.533.092	10	11.918.671.088	10	12.097.451.154		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				105.570.000		90.856.261		122.131.461		123.114.487		124.961.205		126.835.623		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1	105.570.000	1	90.856.261	1	122.131.461	1	123.114.487	1	124.961.205	1	126.835.623		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				105.570.000		90.856.261		91.256.839		91.991.358		93.371.228		94.771.797		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	105.570.000	1	90.856.261	1	91.256.839	1	91.991.358	1	93.371.228	1	94.771.797		
4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						86.062.575		60.837.892		61.327.572		62.247.486		63.181.198		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)				500	86.062.575	500	60.837.892	500	61.327.572	500	62.247.486	500	63.181.198		
4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						86.062.575		60.837.892		61.327.572		62.247.486		63.181.198		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)				500	86.062.575	500	60.837.892	500	61.327.572	500	62.247.486	500	63.181.198		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				695.270.500		598.367.697		486.703.139		582.611.934		591.351.113		600.221.378		
Persentase produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	564	564		564	213.511.524	564	152.094.731	564	183.982.716	564	186.742.457	564	189.543.593		
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	15	15		15		15		15		15		15			
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4	4		4		4		4		4		4			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				248.088.700		213.511.524		152.094.731		183.982.716		186.742.457		189.543.593		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	564	564	248.088.700	564	213.511.524	564	152.094.731	564	183.982.716	564	186.742.457	564	189.543.593		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				297.453.200		255.995.884		212.932.623		245.310.288		248.989.942		252.724.791		
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4	4	297.453.200	4	255.995.884	4	212.932.623	4	245.310.288	4	248.989.942	4	252.724.791		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				149.728.600		128.860.289		121.675.785		153.318.930		155.618.714		157.952.994		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	15	15	149.728.600	15	128.860.289	15	121.675.785	15	153.318.930	15	155.618.714	15	157.952.994		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.063.566.867		516.144.813		1.279.356.100		1.330.530.344		1.383.751.557		1.439.101.620		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR (%)	88	90	90	516.144.813	90	1.279.356.100	90	1.330.530.344	95	1.383.751.557	95	1.439.101.620	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH			
	Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran (%)	100	100	100		100		100		100		100					
	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik (Angka)	80	85	85		87		90		92		96					
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100					
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				224.297.867		108.850.871		256.479.189		267.033.538		278.027.649		284.522.838			
Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	1	108.850.871	0	256.479.189	1	267.033.538	1	278.027.649	1	284.522.838				
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				125.143.200		60.731.502		97.930.297		98.124.765		109.152.543		110.462.046			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	1	1	125.143.200	1	60.731.502	1	97.930.297	1	98.124.765	1	109.152.543	1	110.462.046		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				54.612.345		26.503.156		79.274.446		84.606.584		84.589.720		88.764.235			
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5	5	5	54.612.345	5	26.503.156	5	79.274.446	5	84.606.584	5	84.589.720	5	88.764.235		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				44.542.322		21.616.213		79.274.446		84.302.189		84.285.386		85.296.557		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	44.542.322	1	21.616.213	0	79.274.446	1	84.302.189	1	84.285.386	1	85.296.557		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				150.636.000		116.779.704		343.239.062		343.920.665		343.852.116		347.977.308		
Tersedianya data dan dokumen administrasi pembangunan yang akurat, tertib, dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1		1	116.779.704	1	343.239.062	1	343.920.665	1	343.852.116	1	347.977.308		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	10	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				47.500.000		37.610.445		115.707.173		115.936.944		115.913.836		117.304.454		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	10	10	47.500.000	10	37.610.445	10	115.707.173	10	115.936.944	10	115.913.836	10	117.304.454		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				47.500.000		37.610.445		112.482.931		112.706.299		112.683.835		114.035.702		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	1	47.500.000	1	37.610.445	1	112.482.931	1	112.706.299	1	112.683.835	1	114.035.702		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				55.636.000		41.558.814		115.048.958		115.277.422		115.254.445		116.637.152		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	55.636.000	1	41.558.814	1	115.048.958	1	115.277.422	1	115.254.445	1	116.637.152		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				435.741.000		167.786.746		385.121.914		424.475.357		466.829.827		512.272.269		
Persentase Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150	350		350	167.786.746	400	385.121.914	450	424.475.357	500	466.829.827	550	512.272.269		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				223.621.000		64.845.745		148.840.824		164.050.031		180.419.066		197.981.532		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12	12	223.621.000	12	64.845.745	12	148.840.824	12	164.050.031	12	180.419.066	12	197.981.532		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				99.120.000		48.102.546		110.410.059		121.692.242		133.834.785		146.862.615		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	99.120.000	1	48.102.546	1	110.410.059	1	121.692.242	1	133.834.785	1	146.862.615		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				113.000.000		54.838.455		125.871.031		138.733.084		152.575.976		167.428.122		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150	350	113.000.000	350	54.838.455	400	125.871.031	450	138.733.084	500	152.575.976	550	167.428.122		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				252.892.000		122.727.492		294.515.935		295.100.784		295.041.965		294.329.205		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	1		1	122.727.492	1	294.515.935	1	295.100.784	1	295.041.965	1	294.329.205		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				95.730.000		46.457.392		99.667.984		99.865.904		99.845.999		99.604.792		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	95.730.000	1	46.457.392	1	99.667.984	1	99.865.904	1	99.845.999	1	99.604.792		
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				78.581.000		38.135.050		97.930.295		98.124.765		98.105.207		97.868.205		



**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	1	78.581.000	1	38.135.050	1	97.930.295	1	98.124.765	1	98.105.207	1	97.868.205		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				78.581.000		38.135.050		96.917.656		97.110.115		97.090.759		96.856.208		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	1	78.581.000	1	38.135.050	1	96.917.656	1	97.110.115	1	97.090.759	1	96.856.208		

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029



Untuk memastikan keterukuran pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, ditetapkan indikator kinerja daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Indikator ini sekaligus selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala.

Tabel 4.3 berikut menyajikan indikator kinerja, satuan pengukuran, baseline tahun 2024, target tahunan hingga tahun 2030, serta keterangan penjelas:

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Capaian HAM	%	90	90	90	90	95	95	95	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	-	29,77	29,8	29,8	29,85	29,85	29,9	
2	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	unit	0	81,3	81,5	81,7	82	82,5	82,7	
3	Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD	Angka	2,65	2,65	2,70	2,75	2,75	2,80	2,85	

Untuk menjamin keterukuran pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, ditetapkan indikator kinerja daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Indikator ini mencakup aspek pelayanan umum maupun indikator kinerja kunci (IKK), yang sekaligus selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Indikator tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu:

1. Sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.
2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara periodik.
3. Sebagai dasar pengendalian kebijakan, baik di tingkat perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah, agar arah pembangunan daerah berjalan konsisten dengan target RPJMD.

Berdasarkan hasil perumusan, indikator kinerja daerah yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. **Aspek Pelayanan Umum**



- **Persentase Capaian HAM.** Target indikator ini dipertahankan stabil pada 90% sejak 2025 hingga 2027, kemudian ditingkatkan secara bertahap menjadi 95% pada tahun 2028 hingga 2030. Hal ini menunjukkan konsistensi upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**
 - **Indeks Kematangan Organisasi.** Target tahun 2025 dimulai pada angka 29,77, kemudian ditingkatkan secara bertahap hingga 29,90 pada tahun 2030. Hal ini merefleksikan komitmen peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
 - **Jumlah Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik.** Target meningkat signifikan dari baseline 0 menjadi 81,3 unit pada tahun 2025, dan terus meningkat secara bertahap hingga 82,7 unit pada tahun 2030. Indikator ini mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
 - **Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD.** Target ditetapkan meningkat dari 2,65 pada baseline 2024 menjadi 2,85 pada tahun 2030. Peningkatan nilai ini menggambarkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah melalui kinerja kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pertanggungjawaban publik.

Dengan indikator-indikator tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD 2025–2029, khususnya dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi yang aman, inovatif, dan terintegrasi.

4.4 Program Proritas Daerah

Sebagai bagian dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan identifikasi subkegiatan yang secara langsung mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tidak memiliki subkegiatan yang secara eksplisit dikategorikan sebagai subkegiatan prioritas pembangunan daerah. Hal ini karena tugas dan fungsi Sekretariat Daerah lebih bersifat koordinatif, administratif, dan fasilitatif, bukan sebagai pelaksana teknis pembangunan prioritas.

Namun demikian, meskipun tidak tercantum secara langsung, Sekretariat Daerah tetap mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah melalui:

1. Fungsi koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program prioritas sesuai dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD.



Contoh: koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur strategis dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah terkait lainnya.

2. **Fungsi fasilitasi** penyusunan kebijakan, dokumen perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Contoh: fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dukungan integrasi kebijakan sektoral ke dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.

3. **Dukungan administratif dan teknis** berupa pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset, kelembagaan, serta pelayanan umum yang memungkinkan perangkat daerah pelaksana program prioritas dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Contoh: pengelolaan administrasi keuangan daerah untuk menjamin tersedianya pendanaan program prioritas sesuai jadwal, serta penyiapan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

4. **Fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja** pembangunan daerah, guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program prioritas dengan target RPJMD.

Contoh: penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk evaluasi pencapaian target indikator makro (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM) yang terkait dengan program prioritas daerah.

Dengan demikian, meskipun Tabel 4.4 disajikan dengan keterangan “Nihil”, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tetap berperan penting dan proaktif dalam memastikan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, fasilitasi kebijakan, serta koordinasi lintas sektor.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			Tidak terdapat subkegiatan prioritas di Sekretariat Daerah, namun mendukung pencapaian melalui fungsi koordinasi perencanaan infrastruktur, fasilitasi penyusunan produk hukum, pengendalian laporan kinerja lintas sektor, serta dukungan administratif.



4.5 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dirumuskan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029.

Penyusunan indikator ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, relevansi dengan tugas pokok dan fungsi, serta keselarasan dengan indikator pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki pedoman yang terstruktur dalam menilai kinerja, sekaligus memastikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang nyata.

4.5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan instrumen pengukuran capaian kinerja yang bersifat strategis dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. IKU ini menjadi jembatan antara tujuan/sasaran organisasi dengan capaian pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH									
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	60,78	60,78	64	65	66	68	71	
3.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,22	3,22	3,60	3,70	3,80	3,90	4,01	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,44	70,44	73,00	74,00	75,50	78,30	81,50	
5.	Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD	Angka	2,60	2,65	2,70	2,75	2,75	2,80	2,85	
6.	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	29,75	29,77	29,8	29,85	29,85	29,85	29,9	
7.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	80	80	81	82	83	84	85	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029



1. Nilai SAKIP Kabupaten

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi indikator utama akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Dengan baseline 60,78 pada tahun 2024, ditargetkan peningkatan bertahap hingga 71 pada tahun 2030. Peningkatan ini menegaskan komitmen Sekretariat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks ini mengukur kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Baseline 3,22 (2024) ditargetkan meningkat hingga 4,01 (2030). Peningkatan ini mencerminkan upaya berkesinambungan dalam memperbaiki mutu layanan publik sehingga masyarakat memperoleh kepuasan dan manfaat yang lebih baik.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Dengan baseline 70,44 (2024), target peningkatan ditetapkan hingga 81,50 (2030). Hal ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem manajemen birokrasi yang profesional dan responsif.

4. Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD

Nilai LPPD merupakan cerminan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan baseline 2,60 (2024), target peningkatan ditetapkan menjadi 2,85 (2030). Indikator ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

5. Indeks Kematangan Organisasi

Indeks ini mengukur kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dengan baseline 29,75 (2024), target ditetapkan 29,90 (2030). Walaupun peningkatan relatif kecil, hal ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat kelembagaan agar lebih adaptif dan efektif.

6. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum menggambarkan efektivitas upaya penataan regulasi dan kepatuhan hukum. Baseline 80 (2024) ditargetkan meningkat menjadi 85 (2030). Peningkatan ini diharapkan memperkuat kepastian hukum dan tata pemerintahan yang tertib.

4.5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Indeks Kematangan Organisasi	komulatif	Indeks	29,75	29,77	29,8	29,8	29,85	29,85	29,9	
3.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	positif	unit	81,29	81,3	81,5	81,7	82	82,5	82,7	
4.	Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD	positif	Angka	2,65	2,65	2,70	2,75	2,75	2,80	2,85	

Sumber : RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029

1. Indeks Kematangan Organisasi (Komulatif)

Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi Sekretariat Daerah mencapai tingkat kematangan yang optimal. Dengan baseline 29,75 (2024), target ditetapkan meningkat secara konsisten hingga 29,90 (2030). Hal ini mencerminkan penguatan kelembagaan dan efisiensi manajerial.

2. Jumlah Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik

Indikator ini merefleksikan tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan publik. Baseline 81,29 unit (2024) ditargetkan meningkat hingga 82,70 unit (2030). Hal ini menunjukkan komitmen Sekretariat Daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh instansi.

3. Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD

Dengan baseline 2,65 (2024), target peningkatan ditetapkan menjadi 2,85 (2030). Indikator ini menegaskan pentingnya pelaporan kinerja pemerintahan yang akurat, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Dokumen ini sekaligus merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, sehingga diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, terukur, dan konsisten dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Dalam Renstra ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan satu tujuan strategis utama, yaitu: “ ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.***”

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran, outcome, output, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang operasional, dilengkapi indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan pendanaan. Tiga program utama yang menjadi fokus Sekretariat Daerah adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Seluruh program ini diarahkan untuk memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan lintas sektor, serta memberikan dukungan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra ini juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Selain itu, pelaksanaan Renstra akan terus dipantau melalui mekanisme evaluasi tahunan, tengah periode, dan akhir periode, guna menjamin ketercapaian target serta memastikan keselarasan dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menegaskan komitmen untuk:



- Mendukung penuh pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.
- Menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran perangkat daerah, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, dan masyarakat Kabupaten Bengkayang dapat merasakan manfaat nyata dari peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bengkayang, 22 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkayang



YUSTIANUS, S.E., M.M

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19691116 200003 1 004